



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1807, 2017

KEMENKUMHAM.
Pencabutan.

Tunjangan

Kinerja.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
BAGI MENTERI DAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tatacara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 274);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1507);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Kelas Jabatan adalah tingkat jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.
5. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai, yang disusun dan disepakati bersama antara Pegawai dengan pejabat sebagai atasan Pegawai yang bersangkutan.
6. Jam Kerja adalah rentang waktu Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai untuk mengikuti pendidikan lanjutan dan/atau pendidikan ketrampilan baik di dalam maupun di luar negeri dalam jangka waktu tertentu yang pembiayaan studinya diberikan oleh lembaga/negara yang mendanai pelaksanaan Tugas Belajar dan tidak mengikat kecuali pendidikan kedinasan.
8. Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai

dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kegiatan sehari-hari.

9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
10. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

- (1) Setiap Pegawai berhak menerima Tunjangan Kinerja setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhitung mulai bulan Februari 2017.

BAB II

KOMPONEN PENENTU BESARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 3

Komponen penentu besaran Tunjangan Kinerja terdiri atas:

- a. penilaian Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai;
- b. target kinerja yang dihitung menurut kategori dan nilai capaian SKP; dan
- c. kehadiran menurut hari dan Jam Kerja di lingkungan Kementerian serta cuti yang akan dilaksanakan oleh Pegawai.

Pasal 4

- (1) Besaran Tunjangan Kinerja ditentukan berdasarkan Kelas Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelas Jabatan dan besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Besaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang merangkap jabatan struktural di lingkungan Kementerian, hanya diberikan satu Tunjangan Kinerja yang menguntungkan bagi Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 6

Tunjangan Kinerja dibayarkan secara proporsional berdasarkan Kelas Jabatan dan hasil penilaian SKP.

BAB III

HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI

Pasal 7

- (1) Hari dan Jam Kerja di lingkungan Kementerian ditentukan sebagai berikut:
 - a. pukul 07.30-16.00 waktu setempat pada hari Senin sampai dengan hari Kamis;
 - b. pukul 07.30-16.30 waktu setempat pada hari Jum'at;
 - c. pukul 12.00-13.00 waktu setempat untuk Istirahat pada hari Senin sampai dengan hari Kamis; dan
 - d. pukul 11.30-13.00 waktu setempat untuk Istirahat pada hari Jum'at.
- (2) Pegawai yang melaksanakan tugas di luar hari dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. penugasan atasan langsung;
 - b. keputusan pimpinan unit kerja; atau
 - c. hari dan Jam Kerja tempat Pegawai melaksanakan Tugas Belajar atau pendidikan kedinasan.
- (3) Penentuan hari dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuktikan dengan surat keterangan dari unit kerja atau institusi tempat kegiatan tersebut diselenggarakan.

- (4) Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) hari kerja dan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam 5 (lima) hari kerja.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan masuk kerja sampai dengan pukul 08.00 atau 30 (tiga puluh) menit dari jadwal jam kerja yang telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) maka Pegawai yang bersangkutan wajib mengganti waktu keterlambatan selama 30 (tiga puluh) menit pada hari yang sama.
- (2) Pegawai yang telah mengganti waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai pemotongan Tunjangan Kinerja.
- (3) Penggantian waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) bulan berjalan.

Pasal 9

Pegawai yang melakukan pelanggaran kehadiran menurut hari dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. terlambat masuk kerja;
- b. pulang sebelum waktunya;
- c. tidak masuk kerja; dan/atau
- d. meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada Jam Kerja,

Pasal 10

- (1) Pegawai wajib mencatatkan waktu kedatangan dan kepulangan sesuai dengan ketentuan Jam Kerja pada mesin pencatat kehadiran secara elektronik di unit kerja masing-masing.
- (2) Pencatatan kehadiran dapat dilakukan secara manual, dalam hal:

- a. perangkat dan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
- b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem pencatatan kehadiran secara elektronik;
- c. terjadi keadaan bencana alam dan/atau kerusuhan, sehingga pencatatan kehadiran tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya; atau
- d. lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik.

BAB IV

PEMOTONGAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI

Pasal 11

Tunjangan Kinerja bagi calon PNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari jabatan fungsional umum sampai dengan calon PNS yang bersangkutan diangkat sebagai PNS.

Pasal 12

Bagi Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan tidak dikenai pemotongan Tunjangan Kinerja.

Pasal 13

- (1) Tunjangan Kinerja Pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar, dibayarkan secara proporsional sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya.
- (2) Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Tugas Belajar yang melebihi waktu yang diberikan berdasarkan izin Tugas Belajar dari pimpinan unit kerja, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar:
 - a. 50% (lima puluh per seratus) pada tahun pertama;

- b. 25% (dua puluh lima per seratus) pada tahun kedua; dan
- c. 10 % (sepuluh per seratus), jika lebih dari 2 (dua) tahun.

Pasal 14

- (1) Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya.
- (2) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan secara utuh terhitung mulai tanggal keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional tertentu yang bersangkutan.

Pasal 15

Pegawai dikenai pemotongan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak masuk kerja sebesar 5% (lima per seratus) per hari;
- b. tidak mengikuti pendidikan kedinasan atau Tugas Belajar sebesar 5% (lima per seratus) per hari; dan
- c. tidak berada di tempat tugas sebesar 1% (satu per seratus) per hari.

Pasal 16

Bagi Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan dikenai pemotongan Tunjangan Kinerja pada bulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam rentang waktu 1 (satu) menit sampai dengan 31 (tiga puluh satu) menit, dipotong sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus) untuk setiap kali terlambat;
- b. dalam rentang waktu 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 61 (enam puluh satu) menit, dipotong sebesar 1% (satu per seratus) untuk setiap kali terlambat;

- c. dalam rentang waktu 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 91 (sembilan puluh satu) menit, dipotong sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima per seratus) untuk setiap kali terlambat; dan
- d. dalam rentang waktu 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja, dipotong sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) untuk setiap kali terlambat.

Pasal 17

Pegawai yang tidak memenuhi penggantian Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenai potongan sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus).

Pasal 18

Bagi Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan dikenai pemotongan Tunjangan Kinerja pada bulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam rentang waktu 1 (satu) menit sampai dengan 31 (tiga puluh satu) menit, dipotong sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus) untuk setiap kali pulang kerja sebelum waktunya;
- b. dalam rentang waktu 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 61 (enam puluh satu) menit, dipotong sebesar 1% (satu per seratus) untuk setiap kali pulang kerja sebelum waktunya;
- c. dalam rentang waktu 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 91 (sembilan puluh satu) menit, dipotong sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima per seratus) untuk setiap kali pulang kerja sebelum waktunya; dan
- d. dalam rentang waktu 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja, dipotong sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) untuk setiap kali pulang kerja sebelum waktunya.

Pasal 19

- (1) Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan atau cuti besar, Tunjangan Kinerja dibayarkan secara proporsional dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus per seratus);
 - b. Pegawai yang melaksanakan cuti besar, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebagai berikut:
 1. sampai dengan 30 (tiga puluh) hari pertama sebesar 50% (lima puluh per seratus);
 2. sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kedua sebesar 25% (dua puluh lima per seratus); dan
 3. sampai dengan 30 (tiga puluh) hari ketiga sebesar 10% (sepuluh per seratus).
- (2) Penghitungan hari sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b dihitung sejak tanggal cuti tersebut dilaksanakan.

Pasal 20

Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti alasan penting, Tunjangan Kinerja dipotong sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) per hari.

Pasal 21

Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin, Tunjangan Kinerja dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin untuk persalinan anak pertama sampai dengan kedua, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
- b. Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin untuk persalinan anak ketiga, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebagai berikut:
 1. sampai dengan 30 (tiga puluh) hari pertama sebesar 60% (enam puluh per seratus);

2. sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kedua sebesar 30% (tiga puluh per seratus); dan
3. sampai dengan 30 (tiga puluh) hari ketiga sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Pasal 22

- (1) Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti sakit, Tunjangan Kinerja dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sakit selama 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) hari dibayarkan sebesar 100% (seratus per seratus);
 - b. sakit selama 3 (tiga) hari sampai dengan 6 (enam) bulan dipotong sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) per hari; dan
 - c. sakit lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan dibayarkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) per hari.
- (2) Pelaksanaan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh dokter, bagi Pegawai yang melaksanakan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b. surat keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bagi Pegawai yang melaksanakan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat yang menangani bidang kepegawaian dalam waktu paling lama:
 - a. 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak hari pertama masuk kerja setelah sembuh dari sakit, untuk cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b. 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak hari pertama mulai cuti untuk cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.

Pasal 23

- (1) Bagi Pegawai yang memiliki izin dan alasan yang sah, potongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dan huruf b, Pasal 16, dan Pasal 18, hanya dikenai 50% (lima puluh per seratus) dari besaran potongan Tunjangan Kinerja yang seharusnya dikenakan.
- (2) Izin atau alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan cara mengajukan permohonan izin kepada atasan langsung untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Permohonan izin yang telah disetujui oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada pejabat yang menangani bidang kepegawaian dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak hari pertama masuk kerja setelah melaksanakan izin.
- (4) Format surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENCATATAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Pencatatan nilai capaian SKP dilaksanakan oleh pejabat penilai sekali dalam 1 (satu) tahun yang dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan atau paling lama akhir Januari tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencatatan kehadiran dan pelaksanaan cuti Pegawai dilakukan setiap bulan dengan periode pencatatan kehadiran yang dilakukan antara tanggal 23 (dua puluh tiga) bulan berjalan sampai dengan tanggal 22 (dua puluh dua) bulan berikutnya.

- (3) Pencatatan nilai capaian SKP, kehadiran, dan pelaksanaan cuti Pegawai dituangkan dalam formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing pimpinan unit kerja di setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian.
- (5) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling rendah pejabat struktural eselon V atau PNS yang pangkatnya paling rendah setingkat pejabat struktural eselon V.

Pasal 25

- (1) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) membuat laporan rincian pembayaran bulanan Tunjangan Kinerja Pegawai.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan pencatatan capaian SKP, kehadiran, serta pelaksanaan cuti Pegawai.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada satuan kerja yang menangani pembayaran Tunjangan Kinerja dalam waktu paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi perubahan jabatan bagi pejabat struktural, penyesuaian Tunjangan Kinerjanya dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan jabatan bagi pejabat fungsional umum dan fungsional tertentu, penyesuaian

Tunjangan Kinerjanya dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Menteri diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% (seratus lima puluh per seratus) dari tunjangan kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian.
- (2) Tunjangan kinerja bagi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan Januari 2017.

Pasal 28

Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja Menteri dan Pegawai dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara bagian Kementerian.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1367), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
 ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 33 TAHUN 2017
 TENTANG
 PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN
 KINERJA BAGI MENTERI DAN PEGAWAI DI
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN
 HAK ASASI MANUSIA

A. DAFTAR NAMA JABATAN MENTERI DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA

NO.	NAMA JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1	MENTERI	49.860.000

B. DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN, DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1	SEKRETARIS JENDERAL	17	33.240.000
2	KEPALA BIRO PERENCANAAN	15	19.280.000
3	KEPALA BAGIAN REFORMASI BIROKRASI	12	9.896.000
4	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN REFORMASI BIROKRASI	9	5.079.200
5	KEPALA SUBBAGIAN FASILITASI DAN SOSIALISASI REFORMASI BIROKRASI	9	5.079.200
6	KEPALA SUBBAGIAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI	9	5.079.200
7	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	PELAPORAN		
8	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN	12	9.896.000
9	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN I	9	5.079.200
10	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN II	9	5.079.200
11	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN III	9	5.079.200
12	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN IV	9	5.079.200
13	KEPALA BAGIAN PEMANTAUAN, ANALISIS DAN PELAPORAN	12	9.896.000
14	KEPALA SUBBAGIAN PEMANTAUAN, ANALISIS, DAN PELAPORAN I	9	5.079.200
15	KEPALA SUBBAGIAN PEMANTAUAN, ANALISIS, DAN PELAPORAN II	9	5.079.200
16	KEPALA SUBBAGIAN PEMANTAUAN, ANALISIS, DAN PELAPORAN III	9	5.079.200
17	KEPALA SUBBAGIAN PEMANTAUAN, ANALISIS, DAN PELAPORAN IV	9	5.079.200
18	KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN	12	9.896.000
19	KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS, PENATAAN DAN EVALUASI KELEMBAGAAN I	9	5.079.200
20	KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS, PENATAAN DAN EVALUASI KELEMBAGAAN II	9	5.079.200
21	KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS, PENATAAN DAN EVALUASI KELEMBAGAAN III	9	5.079.200
22	KEPALA BAGIAN TATA LAKSANA	12	9.896.000
23	KEPALA SUBBAGIAN STANDARDISASI SARANA KERJA	9	5.079.200
24	KEPALA SUBBAGIAN SISTEM, PROSEDUR, DAN METODA	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
25	KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS TATA LAKSANA	9	5.079.200
26	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO	9	5.079.200
27	KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN	15	19.280.000
28	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	12	9.896.000
29	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN PENEMPATAN PEGAWAI	9	5.079.200
30	KEPALA SUBBAGIAN SELEKSI PEGAWAI	9	5.079.200
31	KEPALA SUBBAGIAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	9	5.079.200
32	KEPALA SUBBAGIAN DATA DAN ARSIP PEGAWAI	9	5.079.200
33	KEPALA BAGIAN PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI	12	9.896.000
34	KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS PENGEMBANGAN KARIR	9	5.079.200
35	KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN ADMINISTRASI	9	5.079.200
36	KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL I	9	5.079.200
37	KEPALA BAGIAN SUBBAGIAN ANALISIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL II	9	5.079.200
38	KEPALA BAGIAN MUTASI PEGAWAI	12	9.896.000
39	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN ADMINISTRASI	9	5.079.200
40	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI JABATAN FUNGSIONAL I	9	5.079.200
41	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI JABATAN FUNGSIONAL II	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
42	KEPALA SUBBAGIAN KEPANGKATAN DAN PENSIUN	9	5.079.200
43	KEPALA BAGIAN PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN PEGAWAI	12	9.896.000
44	KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN PEGAWAI I	9	5.079.200
45	KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN PEGAWAI II	9	5.079.200
46	KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN PEGAWAI III	9	5.079.200
47	KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN PEGAWAI IV	9	5.079.200
48	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI	12	9.896.000
49	KEPALA SUBBAGIAN PERIZINAN, KONSULTASI, DAN PERLINDUNGAN PEGAWAI	9	5.079.200
50	KEPALA SUBBAGIAN JAMINAN SOSIAL DAN PEMBEKALAN PURNA BAKTI	9	5.079.200
51	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO	9	5.079.200
52	KEPALA BIRO KEUANGAN	15	19.280.000
53	KEPALA BAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	12	9.896.000
54	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN I	9	5.079.200
55	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN II	9	5.079.200
56	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN III	9	5.079.200
57	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN IV	9	5.079.200
58	KEPALA BAGIAN TATA USAHA KEUANGAN	12	9.896.000
59	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA KEUANGAN I	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
60	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA KEUANGAN II	9	5.079.200
61	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA KEUANGAN III	9	5.079.200
62	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO	9	5.079.200
63	KEPALA BAGIAN PERBENDAHARAAN	12	9.896.000
64	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN I	9	5.079.200
65	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN II	9	5.079.200
66	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN III	9	5.079.200
67	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN IV	9	5.079.200
68	KEPALA BAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	12	9.896.000
69	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN I	9	5.079.200
70	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN II	9	5.079.200
71	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN III	9	5.079.200
72	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN IV	9	5.079.200
73	KEPALA BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	15	19.280.000
74	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN BARANG MILIK NEGARA DAN TATA USAHA BIRO	12	9.896.000
75	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN BARANG MILIK NEGARA I	9	5.079.200
76	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN BARANG MILIK NEGARA II	9	5.079.200
77	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN BARANG MILIK NEGARA III	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
78	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO	9	5.079.200
79	KEPALA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG MILIK NEGARA	12	9.896.000
80	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI LAYANAN PENGADAAN	9	5.079.200
81	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN	9	5.079.200
82	KEPALA SUBBAGIAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI	9	5.079.200
83	KEPALA BAGIAN STATUS PENGGUNAAN DAN PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA	12	9.896.000
84	KEPALA SUBBAGIAN STATUS PENGGUNAAN DAN PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA I	9	5.079.200
85	KEPALA SUBBAGIAN STATUS PENGGUNAAN DAN PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA II	9	5.079.200
86	KEPALA SUBBAGIAN STATUS PENGGUNAAN DAN PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA III	9	5.079.200
87	KEPALA BAGIAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA	12	9.896.000
88	KEPALA SUBBAGIAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA I	9	5.079.200
89	KEPALA SUBBAGIAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA II	9	5.079.200
90	KEPALA SUBBAGIAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA III	9	5.079.200
91	KEPALA BAGIAN PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA	12	9.896.000
92	KEPALA SUBBAGIAN PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	NEGARA I		
93	KEPALA SUBBAGIAN PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA II	9	5.079.200
94	KEPALA SUBBAGIAN PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA III	9	5.079.200
95	KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT, HUKUM, DAN KERJASAMA	15	19.280.000
96	KEPALA BAGIAN KERJA SAMA DALAM NEGERI	12	9.896.000
97	KEPALA SUBBAGIAN KERJA SAMA LEMBAGA PEMERINTAH	9	5.079.200
98	KEPALA SUBBAGIAN KERJA SAMA LEMBAGA NON PEMERINTAH	9	5.079.200
99	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO	9	5.079.200
100	KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT	12	9.896.000
101	KEPALA SUBBAGIAN PELIPUTAN DAN PENYAJIAN BERITA	9	5.079.200
102	KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN PERS DAN MEDIA MASSA	9	5.079.200
103	KEPALA SUBBAGIAN ARSIP DAN DOKUMENTASI	9	5.079.200
104	KEPALA BAGIAN KERJA SAMA LUAR NEGERI	12	9.896.000
105	KEPALA SUBBAGIAN KERJA SAMA BILATERAL	9	5.079.200
106	KEPALA SUBBAGIAN KERJA SAMA REGIONAL	9	5.079.200
107	KEPALA SUBBAGIAN KERJASAMA MULTILATERAL	9	5.079.200
108	KEPALA BAGIAN LAYANAN ADVOKASI HUKUM	12	9.896.000

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
109	KEPALA SUBBAGIAN LAYANAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM KEMENTERIAN	9	5.079.200
110	KEPALA SUBBAGIAN ADVOKASI HUKUM KEMENTERIAN	9	5.079.200
111	KEPALA BIRO UMUM	15	19.280.000
112	KEPALA BAGIAN TATA USAHA KEMENTERIAN	12	9.896.000
113	KEPALA SUBBAGIAN PERSURATAN	9	5.079.200
114	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS	9	5.079.200
115	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF	9	5.079.200
116	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO	9	5.079.200
117	KEPALA BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN	12	9.896.000
118	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA MENTERI	9	5.079.200
119	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA SEKRETARIS JENDERAL	9	5.079.200
120	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA STAF AHLI DAN STAF KHUSUS MENTERI	9	5.079.200
121	KEPALA BAGIAN BINA SIKAP MENTAL DAN LAYANAN KESEHATAN	12	9.896.000
122	KEPALA SUBBAGIAN BINA SIKAP MENTAL PEGAWAI	9	5.079.200
123	KEPALA SUBBAGIAN LAYANAN KESEHATAN PEGAWAI	9	5.079.200
124	KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA	12	9.896.000
125	KEPALA SUBBAGIAN URUSAN DALAM	9	5.079.200
126	KEPALA SUBBAGIAN KENDARAAN DAN PERJALANAN DINAS	9	5.079.200
127	KEPALA SUBBAGIAN GAJI DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
128	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL	9	5.079.200
129	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN PENGAMANAN	12	9.896.000
130	KEPALA SUBBAGIAN ACARA DAN TAMU PIMPINAN	9	5.079.200
131	KEPALA SUBBAGIAN KEPROTOKOLAN	9	5.079.200
132	KEPALA SUBBAGIAN PENGAMANAN PIMPINAN	9	5.079.200
133	KEPALA SUBBAGIAN PENGAMANAN LINGKUNGAN, INSTALASI, DOKUMEN, DAN JALUR INFORMASI	9	5.079.200
134	KEPALA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	15	19.280.000
135	KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM	12	9.896.000
136	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN	9	5.079.200
137	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	9	5.079.200
138	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	9	5.079.200
139	KEPALA BIDANG STANDARDISASI DAN KERJA SAMA TEKNOLOGI INFORMASI	12	9.896.000
140	KEPALA SUBBIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI	9	5.079.200
141	KEPALA SUBBIDANG STANDARDISASI TEKNOLOGI INFORMASI	9	5.079.200
142	KEPALA SUBBIDANG KERJA SAMA DAN EVALUASI TEKNOLOGI INFORMASI	9	5.079.200
143	KEPALA BIDANG DATA DAN PENGAMANAN JARINGAN	12	9.896.000

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
144	KEPALA SUBBIDANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI	9	5.079.200
145	KEPALA SUBBIDANG PENGAMANAN DATA DAN JARINGAN	9	5.079.200
146	KEPALA SUBBIDANG PEMELIHARAAN TEKNOLOGI INFORMASI	9	5.079.200
147	INSPEKTUR JENDERAL	17	33.240.000
148	SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL	15	19.280.000
149	KEPALA BAGIAN PROGRAM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PELAPORAN	12	9.896.000
150	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN	9	5.079.200
151	KEPALA SUBBAGIAN KELEMBAGAAN DAN REFORMASI BIROKRASI	9	5.079.200
152	KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT	9	5.079.200
153	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	9	5.079.200
154	KEPALA BAGIAN SISTEM INFORMASI PENGAWASAN	12	9.896.000
155	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI	9	5.079.200
156	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN DAN ANALISIS DATA HASIL PENGAWASAN I	9	5.079.200
157	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN DAN ANALISIS DATA HASIL PENGAWASAN II	9	5.079.200
158	KEPALA SUBBAGIAN LAYANAN PENGADUAN	9	5.079.200
159	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12	9.896.000
160	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	9	5.079.200
161	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
162	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	9	5.079.200
163	KEPALA SUBBAGIAN PERJALANAN DINAS	9	5.079.200
164	KEPALA BAGIAN UMUM	12	9.896.000
165	KEPALA SUBBAGIAN PERSURATAN DAN ARSIP	9	5.079.200
166	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	9	5.079.200
167	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	9	5.079.200
168	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12	9.896.000
169	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	9	5.079.200
170	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI DAN PEMBERHENTIAN	9	5.079.200
171	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI JABATAN DAN PENGEMBANGAN	9	5.079.200
172	INSPEKTUR WILAYAH I	15	19.280.000
173	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT WILAYAH I	9	5.079.200
174	INSPEKTUR WILAYAH II	15	19.280.000
175	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT WILAYAH II	9	5.079.200
176	INSPEKTUR WILAYAH III	15	19.280.000
177	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT WILAYAH III	9	5.079.200
178	INSPEKTUR WILAYAH IV	15	19.280.000
179	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT WILAYAH IV	9	5.079.200
180	INSPEKTUR WILAYAH V	15	19.280.000
181	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT WILAYAH V	9	5.079.200
182	INSPEKTUR WILAYAH VI	15	19.280.000

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
183	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT WILAYAH VI	9	5.079.200
184	DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI	17	33.240.000
185	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	15	19.280.000
186	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12	9.896.000
187	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN WILAYAH I	9	5.079.200
188	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN WILAYAH II	9	5.079.200
189	KEPALA SUBBAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KELEMBAGAAN	9	5.079.200
190	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI, PELAPORAN, DAN REFORMASI BIROKRASI	9	5.079.200
191	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12	9.896.000
192	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	9	5.079.200
193	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI DAN ADMINISTRASI JABATAN	9	5.079.200
194	KEPALA SUBBAGIAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERHENTIAN	9	5.079.200
195	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12	9.896.000
196	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	9	5.079.200
197	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN DAN TATA USAHA KEUANGAN	9	5.079.200
198	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	9	5.079.200
199	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	9	5.079.200
200	KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN LAYANAN PENGADAAN	12	9.896.000

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
201	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK NEGARA	9	5.079.200
202	KEPALA SUBBAGIAN PENATAUSAHAAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA	9	5.079.200
203	KEPALA SUBBAGIAN LAYANAN PENGADAAN	9	5.079.200
204	KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM	12	9.896.000
205	KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT	9	5.079.200
206	KEPALA SUBBAGIAN PERSURATAN DAN KEPUSTAKAAN	9	5.079.200
207	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	9	5.079.200
208	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	9	5.079.200
209	DIREKTUR LALU LINTAS KEIMIGRASIAN	15	19.280.000
210	KEPALA SUBDIREKTORAT VERIFIKASI DOKUMEN PERJALANAN	12	9.896.000
211	KEPALA SEKSI VERIFIKASI DOKUMEN PERJALANAN WILAYAH I	9	5.079.200
212	KEPALA SEKSI VERIFIKASI DOKUMEN PERJALANAN WILAYAH II	9	5.079.200
213	KEPALA SEKSI VERIFIKASI DOKUMEN PERJALANAN WILAYAH III	9	5.079.200
214	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN DAN ANALISIS DOKUMEN PERJALANAN	12	9.896.000
215	KEPALA SEKSI PERENCANAAN, ANALISIS KEBUTUHAN DAN STANDARDISASI DOKUMEN PERJALANAN	9	5.079.200
216	KEPALA SEKSI PENCETAKAN DAN PENDISTRIBUSIAN DOKUMEN PERJALANAN	9	5.079.200
217	KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DOKUMEN PERJALANAN	9	5.079.200
218	KEPALA SUBDIREKTORAT VISA	12	9.896.000

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
219	KEPALA SEKSI PERENCANAAN, ANALISIS KEBUTUHAN, DAN STANDARDISASI VISA	9	5.079.200
220	KEPALA SEKSI VISA KUNJUNGAN	9	5.079.200
221	KEPALA SEKSI VISA TINGGAL TERBATAS	9	5.079.200
222	KEPALA SEKSI VISA NEGARA TERTENTU	9	5.079.200
223	KEPALA SUBDIREKTORAT TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI	12	9.896.000
224	KEPALA SEKSI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI PELABUHAN LAUT	9	5.079.200
225	KEPALA SEKSI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BANDAR UDARA	9	5.079.200
226	KEPALA SEKSI POS LINTAS BATAS DAN TEMPAT LAIN	9	5.079.200
227	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
228	DIREKTUR IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	15	19.280.000
229	KEPALA SUBDIREKTORAT IZIN TINGGAL	12	9.896.000
300	KEPALA SEKSI IZIN TINGGAL NEGARA TERTENTU	9	5.079.200
301	KEPALA SEKSI IZIN TINGGAL TERBATAS	9	5.079.200
302	KEPALA SEKSI IZIN TINGGAL TETAP	9	5.079.200
303	KEPALA SEKSI IZIN TINGGAL DARURAT DAN KEADAAN TERPAKSA	9	5.079.200
304	KEPALA SUBDIREKTORAT ALIH STATUS IZIN TINGGAL	12	9.896.000
305	KEPALA SEKSI ALIH STATUS IZIN TINGGAL TERBATAS	9	5.079.200
306	KEPALA SEKSI ALIH STATUS IZIN TINGGAL TETAP	9	5.079.200
307	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
308	KEPALA SUBDIREKTORAT STATUS KEIMIGRASIAN DAN KEWARGANEGARAAN	12	9.896.000

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
309	KEPALA SEKSI PENELAAHAN STATUS	9	5.079.200
310	KEPALA SEKSI SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
311	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
312	DIREKTUR INTELIJEN KEIMIGRASIAN	15	19.280.000
313	KEPALA SUBDIREKTORAT PENYELIDIKAN DAN OPERASI INTELIJEN KEIMIGRASIAN	12	9.896.000
314	KEPALA SEKSI PENYELIDIKAN KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
315	KEPALA SEKSI OPERASI INTELIJEN WLAYAH I	9	5.079.200
316	KEPALA SEKSI OPERASI INTELIJEN WILAYAH II	9	5.079.200
317	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGAMANAN KEIMIGRASIAN	12	9.896.000
318	KEPALA SEKSI PENGAMANAN KANTOR DAN INSTALASI VITAL	9	5.079.200
319	KEPALA SEKSI PENGAMANAN PERSONIL, MATERIAL, DAN DOKUMEN	9	5.079.200
320	KEPALA SEKSI PENGAMANAN PERIZINAN	9	5.079.200
321	KEPALA SUBDIREKTORAT PRODUKSI INTELIJEN KEIMIGRASIAN	12	9.896.000
322	KEPALA SEKSI PRODUKSI KEGIATAN INTELIJEN	9	5.079.200
323	KEPALA SEKSI PERKIRAAN KEADAAN INTELIJEN	9	5.079.200
324	KEPALA SEKSI LABORATORIUM FORENSIK KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
325	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA INTELIJEN KEIMIGRASIAN	12	9.896.000
326	KEPALA SEKSI KERJA SAMA LEMBAGA INTELIJEN	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
327	KEPALA SEKSI BIMBINGAN JARINGAN NON LEMBAGA	9	5.079.200
328	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
329	DIREKTUR PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	15	19.280.000
330	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGAWASAN KEIMIGRASIAN	12	9.896.000
331	KEPALA SEKSI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN WILAYAH I	9	5.079.200
332	KEPALA SEKSI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN WILAYAH II	9	5.079.200
333	KEPALA SEKSI KEPATUHAN INTERNAL	9	5.079.200
334	KEPALA SUBDIREKTORAT PENYIDIKAN KEIMIGRASIAN	12	9.896.000
335	KEPALA SEKSI PENYIDIKAN WILAYAH I	9	5.079.200
336	KEPALA SEKSI PENYIDIKAN WILAYAH II	9	5.079.200
337	KEPALA SEKSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	9	5.079.200
338	KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN	12	9.896.000
339	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN	9	5.079.200
340	KEPALA SEKSI PENANGKALAN	9	5.079.200
341	KEPALA SUBDIREKTORAT DETENSI IMIGRASI DAN DEPORTASI	12	9.896.000
342	KEPALA SEKSI DETENSI IMIGRASI	9	5.079.200
343	KEPALA SEKSI DEPORTASI	9	5.079.200
344	KEPALA SEKSI IMIGRAN ILEGAL	9	5.079.200
345	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
346	DIREKTUR KERJA SAMA KEIMIGRASIAN	15	19.280.000
347	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA KEIMIGRASIAN ANTARLEMBAGA	12	9.896.000

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
348	KEPALA SEKSI KERJA SAMA KEIMIGRASIAN ANTARLEMBAGA PEMERINTAH	9	5.079.200
349	KEPALA SEKSI KERJA SAMA KEIMIGRASIAN ANTARLEMBAGA NONPEMERINTAH	9	5.079.200
350	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJASAMA KEIMIGRASIAN DENGAN ORGANISASI INTERNASIONAL	12	9.896.000
351	KEPALA SEKSI KERJA SAMA KEIMIGRASIAN DENGAN ORGANISASI INTERNASIONAL PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA	9	5.079.200
352	KEPALA SEKSI KERJA SAMA KEIMIGRASIAN DENGAN ORGANISASI INTERNASIONAL NON PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA	9	5.079.200
353	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJASAMA KEIMIGRASIAN ANTARNEGARA	12	9.896.000
354	KEPALA SEKSI KERJASAMA KEIMIGRASIAN BILATERAL	9	5.079.200
355	KEPALA SEKSI KERJASAMA KEIMIGRASIAN MULTILATERAL	9	5.079.200
356	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA KEIMIGRASIAN PERWAKILAN ASING DAN BINA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA	12	9.896.000
357	KEPALA SEKSI KERJA SAMA KEIMIGRASIAN DENGAN PERWAKILAN NEGARA ASING	9	5.079.200
358	KEPALA SEKSI BINA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA WILAYAH I	9	5.079.200
359	KEPALA SEKSI BINA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA WILAYAH II	9	5.079.200
360	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
361	DIREKTUR SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN	15	19.280.000
362	KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	12	9.896.000

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
363	KEPALA SEKSI PERENCANAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
364	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
365	KEPALA SEKSI PENDAYAGUNAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
366	KEPALA SUBDIREKTORAT PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN	12	9.896.000
367	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN WILAYAH I	9	5.079.200
368	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN WILAYAH II	9	5.079.200
369	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN WILAYAH III	9	5.079.200
370	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN	12	9.896.000
371	KEPALA SEKSI KERJA SAMA TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
372	KEPALA SEKSI PEMANFAATAN INFORMASI KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
373	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN	12	9.896.000
374	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN PERLINTASAN	9	5.079.200
375	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN IZIN KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
376	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN DOKUMEN PERJALANAN	9	5.079.200
377	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
378	DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN	17	33.240.000
379	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL	15	19.280.000

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	PEMASYARAKATAN		
380	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12	9.896.000
381	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN	9	5.079.200
382	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	9	5.079.200
383	KEPALA SUBBAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN, KELEMBAGAAN DAN REFORMASI BIROKRASI	9	5.079.200
384	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12	9.896.000
385	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	9	5.079.200
386	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI DAN ADMINISTRASI JABATAN	9	5.079.200
387	KEPALA SUBBAGIAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERHENTIAN	9	5.079.200
388	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12	9.896.000
389	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	9	5.079.200
390	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN	9	5.079.200
391	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	9	5.079.200
392	KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN UMUM	12	9.896.000
393	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN BARANG MILIK NEGARA	9	5.079.200
394	KEPALA SUBBAGIAN PENATAUSAHAAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA	9	5.079.200
395	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	9	5.079.200
396	KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	12	9.896.000
397	KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS DAN	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	STRATEGI KOMUNIKASI		
398	KEPALA SUBBAGIAN PUBLIKASI	9	5.079.200
399	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	9	5.079.200
400	DIREKTUR KEAMANAN DAN KETERTIBAN	15	19.280.000
401	KEPALA SUBDIREKTORAT INTELIJEN	12	9.896.000
402	KEPALA SEKSI INTELIJEN WILAYAH I	9	5.079.200
403	KEPALA SEKSI INTELIJEN WILAYAH II	9	5.079.200
404	KEPALA SEKSI INTELIJEN WILAYAH III	9	5.079.200
405	KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PEMELIHARAAN KEAMANAN	12	9.896.000
406	KEPALA SEKSI STRATEGI PENCEGAHAN	9	5.079.200
407	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN KEAMANAN	9	5.079.200
408	KEPALA SUBDIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENANGGULANGAN	12	9.896.000
409	KEPALA SEKSI PENINDAKAN	9	5.079.200
410	KEPALA SEKSI PENANGGULANGAN	9	5.079.200
411	KEPALA SUBDIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL DAN EVALUASI	12	9.896.000
412	KEPALA SEKSI KEPATUHAN INTERNAL DAN KODE ETIK	9	5.079.200
413	KEPALA SEKSI LAYANAN PENGADUAN	9	5.079.200
414	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN	9	5.079.200
415	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
416	DIREKTUR PERAWATAN KESEHATAN DAN REHABILITASI	15	19.280.000
417	KEPALA SUBDIREKTORAT PERAWATAN KESEHATAN DASAR, PENYULUHAN DAN EVALUASI	12	9.896.000
418	KEPALA SEKSI PERAWATAN DASAR DAN KELOMPOK RENTAN	9	5.079.200
419	KEPALA SEKSI PENYULUHAN DAN	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	PENCEGAHAN		
420	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN	9	5.079.200
421	KEPALA SUBDIREKTORAT PERAWATAN KESEHATAN LANJUTAN	12	9.896.000
422	KEPALA SEKSI PERAWATAN RUJUKAN	9	5.079.200
423	KEPALA SEKSI PERAWATAN MENTAL DAN PALIATIF	9	5.079.200
424	KEPALA SUBDIREKTORAT PERAWATAN KESEHATAN KHUSUS DAN REHABILITASI	12	9.896.000
425	KEPALA SEKSI PERAWATAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR	9	5.079.200
426	KEPALA SEKSI PERAWATAN HIV/AIDS	9	5.079.200
427	KEPALA SEKSI REHABILITASI KETERGANTUNGAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF	9	5.079.200
428	KEPALA SUBDIREKTORAT KEBUTUHAN DASAR DAN KESEHATAN LINGKUNGAN	12	9.896.000
429	KEPALA SEKSI KEBUTUHAN DASAR	9	5.079.200
430	KEPALA SEKSI GIZI DAN MAKANAN	9	5.079.200
431	KEPALA SEKSI SANITASI DAN KESEHATAN LINGKUNGAN	9	5.079.200
432	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
433	DIREKTUR PELAYANAN TAHANAN DAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA	15	19.280.000
434	KEPALA SUBDIREKTORAT ADMINISTRASI PELAYANAN TAHANAN DAN EVALUASI	12	9.896.000
435	KEPALA SEKSI REGISTRASI TAHANAN	9	5.079.200
436	KEPALA SEKSI ASSESMENT DAN KLASIFIKASI TAHANAN	9	5.079.200
437	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
438	KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN TAHANAN	12	9.896.000
439	KEPALA SEKSI PELAYANAN HUKUM	9	5.079.200
440	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KETERAMPILAN DAN KEPRIBADIAN	9	5.079.200
441	KEPALA SUBDIREKTORAT ADMINISTRASI PENGELOLAAN BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA	12	9.896.000
442	KEPALA SEKSI REGISTRASI BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA	9	5.079.200
443	KEPALA SEKSI PENILAIAN DAN KLASIFIKASI BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA	9	5.079.200
444	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA	12	9.896.000
445	KEPALA SEKSI KLARIFIKASI DAN MUTASI BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA	9	5.079.200
446	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN DAN PEMUSNAHAN BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA	9	5.079.200
447	KEPALA SEKSI PENGAMANAN BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA	9	5.079.200
448	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
449	DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KERJA SAMA	15	19.280.000
450	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI	12	9.896.000
451	KEPALA SEKSI PERANCANGAN TEKNOLOGI INFORMASI	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
452	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI	9	5.079.200
453	KEPALA SUBDIREKTORAT DATA DAN INFORMASI	12	9.896.000
454	KEPALA SEKSI ANALISIS DATA DAN INFORMASI	9	5.079.200
455	KEPALA SEKSI PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI	9	5.079.200
456	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA DAN EVALUASI	12	9.896.000
457	KEPALA SEKSI KERJA SAMA DALAM NEGERI	9	5.079.200
458	KEPALA SEKSI KERJA SAMA LUAR NEGERI	9	5.079.200
459	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN	9	5.079.200
460	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN TEKNOLOGI INFORMASI	12	9.896.000
461	KEPALA SEKSI PENGAMANAN TEKNOLOGI INFORMASI	9	5.079.200
462	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN TEKNOLOGI INFORMASI	9	5.079.200
463	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
464	DIREKTUR BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN PENGENTASAN ANAK	15	19.280.000
465	KEPALA SUBDIREKTORAT PENELITIAN KEMASYARAKATAN DAN PENDAMPINGAN	12	9.896.000
466	KEPALA SEKSI PENELITIAN KEMASYARAKATAN	9	5.079.200
467	KEPALA SEKSI ASSESMENT DAN KLASIFIKASI	9	5.079.200
468	KEPALA SEKSI PENDAMPINGAN DAN DIVERSI	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
469	KEPALA SUBDIREKTORAT PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN	12	9.896.000
470	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KEPRIBADIAN	9	5.079.200
471	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KEMANDIRIAN	9	5.079.200
472	KEPALA SEKSI BIMBINGAN LANJUTAN	9	5.079.200
473	KEPALA SEKSI PENGAWASAN KLIEN	9	5.079.200
474	KEPALA SUBDIREKTORAT REGISTRASI DAN EVALUASI	12	9.896.000
475	KEPALA SEKSI REGISTRASI ANAK	9	5.079.200
476	KEPALA SEKSI REGISTRASI KLIEN	9	5.079.200
477	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN	9	5.079.200
478	KEPALA SUBDIREKTORAT PENDIDIKAN DAN PENGENTASAN ANAK	12	9.896.000
479	KEPALA SEKSI PENDIDIKAN	9	5.079.200
480	KEPALA SEKSI PELAYANAN ANAK	9	5.079.200
481	KEPALA SEKSI PEMBINAAN ANAK	9	5.079.200
482	KEPALA SEKSI INTEGRASI ANAK	9	5.079.200
483	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
484	DIREKTUR PEMBINAAN NARAPIDANA DAN LATIHAN KERJA PRODUKSI	15	19.280.000
485	KEPALA SUBDIREKTORAT ADMINISTRASI PEMBINAAN DAN EVALUASI	12	9.896.000
486	KEPALA SEKSI REGISTRASI NARAPIDANA	9	5.079.200
487	KEPALA SEKSI ASSESMENT DAN KLASIFIKASI NARAPIDANA	9	5.079.200
488	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN	9	5.079.200
489	KEPALA SUBDIREKTORAT PEMBINAAN KEPRIBADIAN	12	9.896.000
490	KEPALA SEKSI PENDIDIKAN DAN KESADARAN BERNEGARA	9	5.079.200
491	KEPALA SEKSI PEMBINAAN MENTAL DAN	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	DISIPLIN		
492	KEPALA SEKSI PEMBINAAN JASMANI DAN KESENIAN	9	5.079.200
493	KEPALA SUBDIREKTORAT INTEGRASI NARAPIDANA DAN PENDAYAGUNAAN TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN	12	9.896.000
494	KEPALA SEKSI ASIMILASI NARAPIDANA	9	5.079.200
495	KEPALA SEKSI INTEGRASI PIDANA UMUM	9	5.079.200
496	KEPALA SEKSI INTEGRASI PIDANA KHUSUS	9	5.079.200
497	KEPALA SEKSI PENDAYAGUNAAN TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN	9	5.079.200
498	KEPALA SUBDIREKTORAT LATIHAN KETERAMPILAN	12	9.896.000
499	KEPALA SEKSI STANDARDISASI PELATIHAN KETERAMPILAN	9	5.079.200
500	KEPALA SEKSI LATIHAN KERJA	9	5.079.200
501	KEPALA SEKSI KEMITRAAN	9	5.079.200
502	KEPALA SUBDIREKTORAT KEGIATAN KERJA PRODUKSI	12	9.896.000
503	KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA INDUSTRI MANUFAKTUR DAN JASA	9	5.079.200
504	KEPALA SEKSI KEGIATAN AGRIBISNIS	9	5.079.200
505	KEPALA SEKSI PEMASARAN	9	5.079.200
506	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN SARANA DAN HASIL KERJA	9	5.079.200
507	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
508	DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	17	33.240.000
509	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	15	19.280.000
510	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN	12	9.896.000

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	PELAPORAN		
511	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN	9	5.079.200
512	KEPALA SUBBAGIAN KELEMBAGAAN DAN REFORMASI BIROKRASI	9	5.079.200
513	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	9	5.079.200
514	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12	9.896.000
515	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	9	5.079.200
516	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI DAN ADMINISTRASI JABATAN	9	5.079.200
517	KEPALA SUBBAGIAN PENEGAKAN DISIPLIN DAN PEMBERHENTIAN	9	5.079.200
518	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12	9.896.000
519	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	9	5.079.200
520	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN	9	5.079.200
521	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	9	5.079.200
522	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI PELAPORAN	9	5.079.200
523	KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN UMUM	12	9.896.000
524	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN BARANG MILIK NEGARA	9	5.079.200
525	KEPALA SUBBAGIAN PENATAUSAHAAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA	9	5.079.200
526	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	9	5.079.200
527	KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TATA USAHA	12	9.896.000

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
528	KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT	9	5.079.200
529	KEPALA SUBBAGIAN PERJALANAN DINAS DAN PERSURATAN	9	5.079.200
530	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	9	5.079.200
531	DIREKTUR PERDATA	15	19.280.000
532	KEPALA SUBDIREKTORAT HUKUM PERDATA UMUM	12	9.896.000
533	KEPALA SEKSI PENDAPAT HUKUM	9	5.079.200
534	KEPALA SEKSI LEGALISASI	9	5.079.200
535	KEPALA SEKSI ADVOKASI KEPERDATAAN	9	5.079.200
536	KEPALA SEKSI ADVOKAT ASING DAN PENTERJEMAH TERSUMPAH	9	5.079.200
537	KEPALA SUBDIREKTORAT BADAN HUKUM	12	9.896.000
538	KEPALA SEKSI PERSEROAN TERTUTUP	9	5.079.200
539	KEPALA SEKSI PERSEROAN TERBUKA, LEMBAGA KEUANGAN DAN PENANAMAN MODAL	9	5.079.200
540	KEPALA SEKSI BADAN HUKUM SOSIAL	9	5.079.200
541	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI DAN PENGUMUMAN BADAN HUKUM	9	5.079.200
542	KEPALA SUBDIREKTORAT JAMINAN FIDUSIA	12	9.896.000
543	KEPALA SEKSI PELAYANAN FIDUSIA	9	5.079.200
544	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN FIDUSIA	9	5.079.200
545	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI FIDUSIA	9	5.079.200
546	KEPALA SUBDIREKTORAT HARTA PENINGGALAN DAN KURATOR NEGARA	12	9.896.000
547	KEPALA SEKSI BALAI HARTA PENINGGALAN DAN PENDAFTARAN KURATOR	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
548	KEPALA SEKSI DAFTAR PUSAT WASIAT	9	5.079.200
549	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI HARTA PENINGGALAN KURATOR DAN WASIAT	9	5.079.200
550	KEPALA SUBDIREKTORAT NOTARIAT	12	9.896.000
551	KEPALA SEKSI PENGANGKATAN DAN PERPINDAHAN NOTARIS	9	5.079.200
552	KEPALA SEKSI PERPANJANGAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN NOTARIS	9	5.079.200
553	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI NOTARIAT DAN SEKRETARIAT MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS	9	5.079.200
554	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
555	DIREKTUR PIDANA	15	19.280.000
556	KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN HUKUM PIDANA DAN GRASI	12	9.896.000
557	KEPALA SEKSI PELAYANAN HUKUM PIDANA	9	5.079.200
558	KEPALA SEKSI PELAYANAN GRASI	9	5.079.200
559	KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI	9	5.079.200
560	KEPALA SUBDIREKTORAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	12	9.896.000
561	KEPALA SEKSI PENGANGKATAN PEMUTASIAN, DAN PEMBERHENTIAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	9	5.079.200
562	KEPALA SEKSI BIMBINGAN DAN EVALUASI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	9	5.079.200
563	KEPALA SUBDIREKTORAT DAKTILOSKOPI	12	9.896.000
564	KEPALA SEKSI PERUMUSAN	9	5.079.200
565	KEPALA SEKSI DATA DAN IDENTIFIKASI	9	5.079.200
566	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI DAN ARSIP TERAAN	9	5.079.200
567	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
568	DIREKTUR TATA NEGARA	15	19.280.000

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
569	KEPALA SUBDIREKTORAT STATUS KEWARGANEGARAAN	12	9.896.000
570	KEPALA SEKSI PEROLEHAN KEWARGANEGARAAN	9	5.079.200
571	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA KEWARGANEGARAAN	9	5.079.200
572	KEPALA SEKSI KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN	9	5.079.200
573	KEPALA SUBDIREKTORAT PEWARGANEGARAAN	12	9.896.000
574	KEPALA SEKSI ANALISIS DAN PERTIMBANGAN PEWARGANEGARAAN	9	5.079.200
575	KEPALA SEKSI PENYELESAIAN PEWARGANEGARAAN	9	5.079.200
576	KEPALA SUBDIREKTORAT PARTAI POLITIK	12	9.896.000
577	KEPALA SEKSI PENDAFTARAN BADAN HUKUM PARTAI POLITIK	9	5.079.200
578	KEPALA SEKSI ANALISIS PERTIMBANGAN DAN ADVOKASI PARTAI POLITIK	9	5.079.200
579	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI PARTAI POLITIK	9	5.079.200
580	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
581	DIREKTUR OTORITAS PUSAT DAN HUKUM INTERNASIONAL	15	19.280.000
582	KEPALA SUBDIREKTORAT BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA	12	9.896.000
517	KEPALA SUBBAGIAN PENEGAKAN DISIPLIN DAN PEMBERHENTIAN	9	5.079.200
518	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12	9.896.000
519	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	9	5.079.200
520	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
521	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	9	5.079.200
522	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI PELAPORAN	9	5.079.200
523	KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN UMUM	12	9.896.000
524	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN BARANG MILIK NEGARA	9	5.079.200
525	KEPALA SUBBAGIAN PENATAUSAHAAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA	9	5.079.200
526	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	9	5.079.200
527	KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TATA USAHA	12	9.896.000
528	KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT	9	5.079.200
529	KEPALA SUBBAGIAN PERJALANAN DINAS DAN PERSURATAN	9	5.079.200
530	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	9	5.079.200
531	DIREKTUR PERDATA	15	19.280.000
532	KEPALA SUBDIREKTORAT HUKUM PERDATA UMUM	12	9.896.000
533	KEPALA SEKSI PENDAPAT HUKUM	9	5.079.200
534	KEPALA SEKSI LEGALISASI	9	5.079.200
535	KEPALA SEKSI ADVOKASI KEPERDATAAN	9	5.079.200
536	KEPALA SEKSI ADVOKAT ASING DAN PENTERJEMAH TERSUMPAH	9	5.079.200
537	KEPALA SUBDIREKTORAT BADAN HUKUM	12	9.896.000
538	KEPALA SEKSI PERSEROAN TERTUTUP	9	5.079.200
539	KEPALA SEKSI PERSEROAN TERBUKA, LEMBAGA KEUANGAN DAN PENANAMAN	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	MODAL		
540	KEPALA SEKSI BADAN HUKUM SOSIAL	9	5.079.200
541	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI DAN PENGUMUMAN BADAN HUKUM	9	5.079.200
542	KEPALA SUBDIREKTORAT JAMINAN FIDUSIA	12	9.896.000
543	KEPALA SEKSI PELAYANAN FIDUSIA	9	5.079.200
544	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN FIDUSIA	9	5.079.200
545	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI FIDUSIA	9	5.079.200
546	KEPALA SUBDIREKTORAT HARTA PENINGGALAN DAN KURATOR NEGARA	12	9.896.000
547	KEPALA SEKSI BALAI HARTA PENINGGALAN DAN PENDAFTARAN KURATOR	9	5.079.200
548	KEPALA SEKSI DAFTAR PUSAT WASIAT	9	5.079.200
549	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI HARTA PENINGGALAN KURATOR DAN WASIAT	9	5.079.200
550	KEPALA SUBDIREKTORAT NOTARIAT	12	9.896.000
551	KEPALA SEKSI PENGANGKATAN DAN PERPINDAHAN NOTARIS	9	5.079.200
552	KEPALA SEKSI PERPANJANGAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN NOTARIS	9	5.079.200
553	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI NOTARIAT DAN SEKRETARIAT MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS	9	5.079.200
554	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
555	DIREKTUR PIDANA	15	19.280.000
556	KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN HUKUM PIDANA DAN GRASI	12	9.896.000
557	KEPALA SEKSI PELAYANAN HUKUM PIDANA	9	5.079.200
558	KEPALA SEKSI PELAYANAN GRASI	9	5.079.200
559	KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	EVALUASI		
560	KEPALA SUBDIREKTORAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	12	9.896.000
561	KEPALA SEKSI PENGANGKATAN PEMUTASIAN, DAN PEMBERHENTIAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	9	5.079.200
562	KEPALA SEKSI BIMBINGAN DAN EVALUASI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	9	5.079.200
563	KEPALA SUBDIREKTORAT DAKTILOSKOPI	12	9.896.000
564	KEPALA SEKSI PERUMUSAN	9	5.079.200
565	KEPALA SEKSI DATA DAN IDENTIFIKASI	9	5.079.200
566	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI DAN ARSIP TERAAN	9	5.079.200
567	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
568	DIREKTUR TATA NEGARA	15	19.280.000
569	KEPALA SUBDIREKTORAT STATUS KEWARGANEGARAAN	12	9.896.000
570	KEPALA SEKSI PEROLEHAN KEWARGANEGARAAN	9	5.079.200
571	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA KEWARGANEGARAAN	9	5.079.200
572	KEPALA SEKSI KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN	9	5.079.200
573	KEPALA SUBDIREKTORAT PEWARGANEGARAAN	12	9.896.000
574	KEPALA SEKSI ANALISIS DAN PERTIMBANGAN PEWARGANEGARAAN	9	5.079.200
575	KEPALA SEKSI PENYELESAIAN PEWARGANEGARAAN	9	5.079.200
576	KEPALA SUBDIREKTORAT PARTAI POLITIK	12	9.896.000
577	KEPALA SEKSI PENDAFTARAN BADAN	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	HUKUM PARTAI POLITIK		
578	KEPALA SEKSI ANALISIS PERTIMBANGAN DAN ADVOKASI PARTAI POLITIK	9	5.079.200
579	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI PARTAI POLITIK	9	5.079.200
580	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
581	DIREKTUR OTORITAS PUSAT DAN HUKUM INTERNASIONAL	15	19.280.000
581	DIREKTUR OTORITAS PUSAT DAN HUKUM INTERNASIONAL	15	19.280.000
582	KEPALA SUBDIREKTORAT BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA	12	9.896.000
583	KEPALA SEKSI PENANGANAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA	9	5.079.200
584	KEPALA SEKSI PERJANJIAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA	9	5.079.200
585	KEPALA SUBDIREKTORAT EKSTRADISI DAN PEMINDAHAN NARAPIDANA	12	9.896.000
586	KEPALA SEKSI PENANGANAN EKSTRADISI DAN PEMINDAHAN NARAPIDANA	9	5.079.200
587	KEPALA SEKSI PERJANJIAN EKSTRADISI DAN PEMINDAHAN NARAPIDANA	9	5.079.200
588	KEPALA SUBDIREKTORAT HUKUM INTERNASIONAL	12	9.896.000
589	KEPALA SEKSI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL	9	5.079.200
590	KEPALA SEKSI HUKUM EKONOMI DAN LEMBAGA INTERNASIONAL	9	5.079.200
591	KEPALA SEKSI HUKUM HUMANITER	9	5.079.200
592	KEPALA SEKSI HUKUM LAUT, UDARA, ANGKASA DAN LINGKUNGAN	9	5.079.200
593	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
594	DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI	15	19.280.000
595	KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN DUKUNGAN TEKNIS	12	9.896.000
596	KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI TEKNOLOGI INFORMASI	9	5.079.200
597	KEPALA SEKSI DUKUNGAN TEKNIS	9	5.079.200
598	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN JARINGAN DAN PERANGKAT KERAS	12	9.896.000
599	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI DATA	9	5.079.200
600	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PERANGKAT KERAS	9	5.079.200
601	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK	12	9.896.000
602	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN BASIS DATA	9	5.079.200
603	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI	9	5.079.200
604	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
605	DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL	17	33.240.000
606	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL	15	19.280.000
607	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12	9.896.000
608	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN	9	5.079.200
609	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	9	5.079.200
610	KEPALA SUBBAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KELEMBAGAAN DAN REFORMASI BIROKRASI	9	5.079.200
611	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12	9.896.000

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
612	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	9	5.079.200
613	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN	9	5.079.200
614	KEPALA SUBBAGIAN PENGEMBANGAN PEGAWAI	9	5.079.200
615	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12	9.896.000
616	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	9	5.079.200
617	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN	9	5.079.200
618	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	9	5.079.200
619	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	9	5.079.200
620	KEPALA BAGIAN UMUM, PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN LAYANAN PENGADAAN	12	9.896.000
621	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	9	5.079.200
622	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	9	5.079.200
623	KEPALA SUBBAGIAN LAYANAN PENGADAAN	9	5.079.200
624	KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	12	9.896.000
625	KEPALA SUBBAGIAN PERSURATAN DAN PERJALANAN DINAS	9	5.079.200
626	KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT	9	5.079.200
627	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	9	5.079.200
628	DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI	15	19.280.000
629	KEPALA SUBDIREKTORAT PERMOHONAN DAN PUBLIKASI	12	9.896.000

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
630	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI PERMOHONAN	9	5.079.200
631	KEPALA SEKSI KLASIFIKASI DAN PUBLIKASI	9	5.079.200
632	KEPALA SEKSI VERIFIKASI CIPTAAN DAN PRODUK HAK TERKAIT	9	5.079.200
633	KEPALA SUBDIREKTORAT PEMERIKSAAN DESAIN INDUSTRI	12	9.896.000
634	KEPALA SEKSI PELAYANAN TEKNIS	9	5.079.200
635	KEPALA SUBDIREKTORAT SERTIFIKASI DAN DOKUMENTASI	12	9.896.000
636	KEPALA SEKSI SERTIFIKASI, MUTASI DAN LISENSI	9	5.079.200
637	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI	9	5.079.200
638	KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN HUKUM DAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF	12	9.896.000
639	KEPALA SEKSI PERTIMBANGAN HUKUM DAN LITIGASI	9	5.079.200
640	KEPALA SEKSI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF	9	5.079.200
641	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
642	DIREKTUR PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG	15	19.280.000
643	KEPALA SUBDIREKTORAT PERMOHONAN DAN PUBLIKASI	12	9.896.000
644	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI PERMOHONAN	9	5.079.200
645	KEPALA SEKSI PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI	9	5.079.200
646	KEPALA SUBDIREKTORAT KLASIFIKASI DAN PENELUSURAN PATEN	12	9.896.000
647	KEPALA SEKSI KLASIFIKASI PATEN	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
648	KEPALA SEKSI PENELUSURAN PATEN	9	5.079.200
649	KEPALA SUBDIREKTORAT PEMERIKSAAN PATEN	12	9.896.000
650	KEPALA SEKSI PELAYANAN TEKNIS	9	5.079.200
651	KEPALA SUBDIREKTORAT SERTIFIKASI, PEMELIHARAAN, MUTASI DAN LISENSI	12	9.896.000
652	KEPALA SEKSI SERTIFIKASI	9	5.079.200
653	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN, MUTASI DAN LISENSI	9	5.079.200
654	KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN HUKUM DAN FASILITASI KOMISI BANDING PATEN	12	9.896.000
655	KEPALA SEKSI PERTIMBANGAN HUKUM DAN LITIGASI	9	5.079.200
656	KEPALA SEKSI FASILITASI KOMISI BANDING PATEN	9	5.079.200
657	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
658	DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS	15	19.280.000
659	KEPALA SUBDIREKTORAT PERMOHONAN DAN PUBLIKASI	12	9.896.000
660	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI PERMOHONAN DAN KLASIFIKASI	9	5.079.200
661	KEPALA SEKSI PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI	9	5.079.200
662	KEPALA SUBDIREKTORAT PEMERIKSAAN MEREK	12	9.896.000
663	KEPALA SEKSI PELAYANAN TEKNIS	9	5.079.200
664	KEPALA SUBDIREKTORAT INDIKASI GEOGRAFIS	12	9.896.000
665	KEPALA SEKSI PEMERIKSAAN INDIKASI GEOGRAFIS	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
666	KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN INDIKASI GEOGRAFIS	9	5.079.200
667	KEPALA SUBDIREKTORAT SERTIFIKASI DAN MONITORING MEREK TERDAFTAR	12	9.896.000
668	KEPALA SEKSI SERTIFIKASI	9	5.079.200
669	KEPALA SEKSI MUTASI DAN LISENSI	9	5.079.200
670	KEPALA SEKSI PERPANJANGAN DAN MONITORING	9	5.079.200
671	KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN HUKUM DAN FASILITASI KOMISI BANDING MEREK	12	9.896.000
672	KEPALA SEKSI PERTIMBANGAN HUKUM DAN LITIGASI	9	5.079.200
673	KEPALA SEKSI FASILITASI KOMISI BANDING MEREK	9	5.079.200
674	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
675	DIREKTUR KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	15	19.280.000
676	KEPALA SUBDIREKTORAT PEMBERDAYAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	12	9.896.000
677	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI KEKAYAAN INTELEKTUAL	9	5.079.200
678	KEPALA SEKSI DISEMINASI DAN PROMOSI	9	5.079.200
679	KEPALA SEKSI INVENTARISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DAN PERPUSTAKAAN	9	5.079.200
680	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA LUAR NEGERI	12	9.896.000
681	KEPALA SEKSI KERJA SAMA REGIONAL	9	5.079.200
682	KEPALA SEKSI KERJA SAMA BILATERAL	9	5.079.200
683	KEPALA SEKSI KERJA SAMA ORGANISASI INTERNASIONAL	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
684	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA DALAM NEGERI	12	9.896.000
685	KEPALA SEKSI KERJA SAMA ANTARLEMBAGA PEMERINTAH	9	5.079.200
686	KEPALA SEKSI KERJA SAMA ANTARLEMBAGA NONPEMERINTAH DAN MONITORING KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	9	5.079.200
687	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
688	DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI KEKAYAAN INTELEKTUAL	15	19.280.000
689	KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN	12	9.896.000
690	KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN STANDARDISASI TEKNOLOGI INFORMASI	9	5.079.200
691	KEPALA SEKSI PORTAL WEB	9	5.079.200
692	KEPALA SUBDIREKTORAT PENDUKUNG INFRASTRUKTUR	12	9.896.000
693	KEPALA SEKSI LAYANAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR	9	5.079.200
694	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN JARINGAN	9	5.079.200
695	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEKAYAAN INTELEKTUAL	12	9.896.000
696	KEPALA SEKSI APLIKASI	9	5.079.200
697	KEPALA SEKSI DATABASE DAN KEAMANAN DATA	9	5.079.200
698	KEPALA SEKSI PELAYANAN DATA DAN INFOMASI KEKAYAAN INTELEKTUAL	9	5.079.200
699	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
700	DIREKTUR PENYIDIKAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	15	19.280.000
701	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGADUAN DAN	12	9.896.000

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	ADMINISTRASI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL		
702	KEPALA SEKSI PENERIMAAN PENGADUAN	9	5.079.200
703	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN DOKUMENTASI	9	5.079.200
704	KEPALA SUBDIREKTORAT PENINDAKAN DAN PEMANTAUAN	12	9.896.000
705	KEPALA SEKSI PENINDAKAN	9	5.079.200
706	KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN BARANG BUKTI	9	5.079.200
707	KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	12	9.896.000
708	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN	9	5.079.200
709	KEPALA SEKSI PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF	9	5.079.200
710	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
711	DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA	17	33.240.000
712	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA	15	19.280.000
713	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12	9.896.000
714	KEPALA SUBBAGIAN KELEMBAGAAN DAN REFORMASI BIROKRASI	9	5.079.200
715	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN	9	5.079.200
716	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	9	5.079.200
717	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12	9.896.000
718	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	9	5.079.200
719	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI DAN ADMINISTRASI JABATAN	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
720	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12	9.896.000
721	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	9	5.079.200
722	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN	9	9.896.000
723	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	9	5.079.200
724	KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN UMUM	12	9.896.000
725	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	9	5.079.200
726	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	9	5.079.200
727	KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TATA USAHA	12	9.896.000
728	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	9	5.079.200
729	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN PERSURATAN	9	5.079.200
730	DIREKTUR PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT	15	19.280.000
731	KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT WILAYAH I	12	9.896.000
732	KEPALA SEKSI HAK SIPIL DAN POLITIK WILAYAH I	9	5.079.200
733	KEPALA SEKSI HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA WILAYAH I	9	5.079.200
734	KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT WILAYAH II	12	9.896.000
735	KEPALA SEKSI HAK SIPIL DAN POLITIK WILAYAH II	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
736	KEPALA SEKSI HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA WILAYAH II	9	5.079.200
737	KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT WILAYAH III	12	9.896.000
738	KEPALA SEKSI HAK SIPIL DAN POLITIK WILAYAH III	9	5.079.200
739	KEPALA SEKSI HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA WILAYAH III	9	5.079.200
740	KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT WILAYAH IV	12	9.896.000
741	KEPALA SEKSI HAK SIPIL DAN POLITIK WILAYAH IV	9	5.079.200
742	KEPALA SEKSI HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA WILAYAH IV	9	5.079.200
743	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
744	DIREKTUR KERJA SAMA HAK ASASI MANUSIA	15	19.280.000
745	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA DALAM NEGERI DAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA WILAYAH I	12	9.896.000
746	KEPALA SEKSI KERJA SAMA DAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA WILAYAH I.A	9	5.079.200
747	KEPALA SEKSI KERJA SAMA DAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA WILAYAH I.B	9	5.079.200
748	KEPALA SEKSI KERJA SAMA DAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA WILAYAH I.C	9	5.079.200
749	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA LUAR NEGERI	12	9.896.000
750	KEPALA SEKSI KERJA SAMA BILATERAL	9	5.079.200
751	KEPALA SEKSI KERJA SAMA REGIONAL	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
752	KEPALA SEKSI KERJA SAMA BADAN-BADAN KHUSUS PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA, DAN ORGANISASI INTERNASIONAL NON PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA	9	5.079.200
753	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA DALAM NEGERI DAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA WILAYAH II	12	9.896.000
754	KEPALA SEKSI KERJA SAMA DAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA WILAYAH II.A	9	5.079.200
755	KEPALA SEKSI KERJA SAMA DAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA WILAYAH II.B	9	5.079.200
756	KEPALA SEKSI KERJA SAMA DAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA WILAYAH II.C	9	5.079.200
757	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
758	DIREKTUR DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA	15	19.280.000
759	KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA	12	9.896.000
760	KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DISEMINASI HAK ASASI MANUSIA	9	5.079.200
761	KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIS PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA	9	5.079.200
762	KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI	9	5.079.200
763	KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA	12	9.896.000
764	KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIS	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	DISEMINASI HAK ASASI MANUSIA		
765	KEPALA SEKSI TEKNIS PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA	9	5.079.200
766	KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI	9	5.079.200
767	KEPALA SUBDIREKTORAT DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH I	12	9.896.000
768	KEPALA SEKSI DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH IA	9	5.079.200
769	KEPALA SEKSI DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH IB	9	5.079.200
770	KEPALA SEKSI DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH IC	9	5.079.200
771	KEPALA SUBDIREKTORAT DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH II	12	9.896.000
772	KEPALA SEKSI DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH IIA	9	5.079.200
773	KEPALA SEKSI DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH IIB	9	5.079.200
774	KEPALA SEKSI DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH IIC	9	5.079.200
775	KEPALA SUBDIREKTORAT DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH III	12	9.896.000

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
776	KEPALA SEKSI DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH IIIA	9	5.079.200
777	KEPALA SEKSI DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH IIIB	9	5.079.200
778	KEPALA SEKSI DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH IIIC	9	5.079.200
779	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
780	DIREKTUR INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA	15	19.280.000
781	KEPALA SUBDIREKTORAT INSTRUMEN HAK SIPIL DAN POLITIK	12	9.896.000
782	KEPALA SEKSI ANALISIS INSTRUMEN HAK SIPIL DAN POLITIK	9	5.079.200
783	KEPALA SEKSI PENYIAPAN INSTRUMEN HAK SIPIL DAN POLITIK	9	5.079.200
784	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN IMPLEMENTASI INSTRUMEN HAK SIPIL DAN POLITIK	9	5.079.200
785	KEPALA SUBDIREKTORAT INSTRUMEN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	12	9.896.000
786	KEPALA SEKSI ANALISIS INSTRUMEN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	9	5.079.200
787	KEPALA SEKSI PENYIAPAN INSTRUMEN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	9	5.079.200
788	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN IMPLEMENTASI INSTRUMEN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	9	5.079.200
789	KEPALA SUBDIREKTORAT INSTRUMEN HAK KELOMPOK RENTAN	12	9.896.000

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
790	KEPALA SEKSI ANALISIS INSTRUMEN HAK KELOMPOK RENTAN	9	5.079.200
791	KEPALA SEKSI PENYIAPAN INSTRUMEN HAK KELOMPOK RENTAN	9	5.079.200
792	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN IMPLEMENTASI INSTRUMEN HAK KELOMPOK RENTAN	9	5.079.200
793	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
794	DIREKTUR INFORMASI HAK ASASI MANUSIA	15	19.280.000
795	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	12	9.896.000
796	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	9	5.079.200
797	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	9	5.079.200
798	KEPALA SUBDIREKTORAT PUBLIKASI MEDIA	12	9.896.000
799	KEPALA SEKSI PUBLIKASI MEDIA CETAK	9	5.079.200
800	KEPALA SEKSI PUBLIKASI MEDIA ELEKTRONIK	9	5.079.200
801	KEPALA SEKSI PUBLIKASI MEDIA ONLINE	9	5.079.200
802	KEPALA SUBDIREKTORAT PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI	12	9.896.000
803	KEPALA SEKSI PERPUSTAKAAN	9	5.079.200
804	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI	9	5.079.200
805	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
806	DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	17	33.240.000
807	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15	19.280.000
808	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN	12	9.896.000

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	PELAPORAN		
809	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN	9	5.079.200
810	KEPALA SUBBAGIAN KELEMBAGAAN, REFORMASI BIROKRASI, DAN PELAPORAN	9	5.079.200
811	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12	9.896.000
812	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN ADMINISTRASI JABATAN	9	5.079.200
813	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI DAN PEMBERHENTIAN	9	5.079.200
814	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12	9.896.000
815	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	9	5.079.200
816	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI	9	5.079.200
817	KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN UMUM	12	9.896.000
818	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	9	5.079.200
819	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PERSURATAN	9	5.079.200
820	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	9	5.079.200
821	KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA	12	9.896.000
822	KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT	9	5.079.200
823	KEPALA SUBBAGIAN KERJA SAMA	9	5.079.200
824	DIREKTUR PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15	19.280.000
825	KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENYIAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12	9.896.000

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
826	KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN	9	5.079.200
827	KEPALA SEKSI PENYIAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9	5.079.200
828	KEPALA SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG, DAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH	12	9.896.000
829	KEPALA SEKSI PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG	9	5.079.200
830	KEPALA SEKSI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH	9	5.079.200
831	KEPALA SUBDIREKTORAT PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	12	9.896.000
832	KEPALA SEKSI PEMBAHASAN I	9	5.079.200
833	KEPALA SEKSI PEMBAHASAN II	9	5.079.200
834	KEPALA SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN DAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	12	9.896.000
835	KEPALA SEKSI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN	9	5.079.200
836	KEPALA SEKSI PENYUSUNAN DAN PENYELARASAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	9	5.079.200
837	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
838	DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN I	15	19.280.000
839	KEPALA SUBDIREKTORAT HARMONISASI BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN	12	9.896.000
840	KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG POLITIK	9	5.079.200
841	KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG PEMERINTAHAN	9	5.079.200
842	KEPALA SUBDIREKTORAT HARMONISASI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN	12	9.896.000
843	KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG PERTAHANAN	9	5.079.200
844	KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG KEAMANAN	9	5.079.200
845	KEPALA SUBDIREKTORAT HARMONISASI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	12	9.896.000
846	KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA I	9	5.079.200
847	KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA II	9	5.079.200
848	KEPALA SUBDIREKTORAT HARMONISASI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA, KELEMBAGAAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12	9.896.000
849	KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN	9	5.079.200
850	KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	9	5.079.200
851	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
852	DIREKTUR PENGUNDANGAN, PENERJEMAHAN, DAN PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15	19.280.000

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
853	KEPALA SUBDIREKTORAT PUBLIKASI, DOKUMENTASI, DAN PERPUSTAKAAN	12	9.896.000
854	KEPALA SEKSI PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI	9	5.079.200
855	KEPALA SEKSI PERPUSTAKAAN	9	5.079.200
856	KEPALA SUBDIREKTORAT PENERJEMAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12	9.896.000
857	KEPALA SEKSI PENERJEMAHAN BIDANG POLITIK, HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, KEAMANAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	9	5.079.200
858	KEPALA SEKSI PENERJEMAHAN BIDANG PEREKONOMIAN	9	5.079.200
859	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12	9.896.000
860	KEPALA SEKSI PENGUNDANGAN DALAM LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	9	5.079.200
861	KEPALA SEKSI PENGUNDANGAN DALAM BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA	9	5.079.200
862	KEPALA SUBDIREKTORAT SISTEM INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12	9.896.000
863	KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	9	5.079.200
864	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI	9	5.079.200
865	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
866	DIREKTUR LITIGASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15	19.280.000
867	KEPALA SUBDIREKTORAT PENYIAPAN DAN	12	9.896.000

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	PENDAMPINGAN PERSIDANGAN BIDANG POLITIK, HUKUM, HAK ASASI MANUSIA DAN KEAMANAN		
868	KEPALA SEKSI BIDANG POLITIK, HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN KEAMANAN I	9	5.079.200
869	KEPALA SEKSI BIDANG POLITIK, HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN KEAMANAN II	9	5.079.200
870	KEPALA SUBDIREKTORAT PENYIAPAN DAN PENDAMPINGAN PERSIDANGAN BIDANG PEREKONOMIAN	12	9.896.000
871	KEPALA SEKSI BIDANG PEREKONOMIAN I	9	5.079.200
872	KEPALA SEKSI BIDANG PEREKONOMIAN II	9	5.079.200
873	KEPALA SUBDIREKTORAT PENYIAPAN DAN PENDAMPINGAN PERSIDANGAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	12	9.896.000
874	KEPALA SEKSI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT I	9	5.079.200
875	KEPALA SEKSI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT II	9	5.079.200
876	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
877	DIREKTUR FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PEMBINAAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15	19.280.000
878	KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN, PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN AKREDITASI	12	9.896.000
879	KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIS FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH	9	5.079.200
880	KEPALA SEKSI PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN AKREDITASI PERANCANG	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		
881	KEPALA SUBDIREKTORAT FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH	12	9.896.000
882	KEPALA SEKSI FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH I	9	5.079.200
883	KEPALA SEKSI FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH II	9	5.079.200
884	KEPALA SUBDIREKTORAT STANDARDISASI DAN BIMBINGAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12	9.896.000
885	KEPALA SEKSI STANDARDISASI, PEDOMAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9	5.079.200
886	KEPALA SEKSI BIMBINGAN DAN KONSULTASI PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9	5.079.200
887	KEPALA SUBDIREKTORAT SISTEM INFORMASI, MANAJEMEN DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12	9.896.000
888	KEPALA SEKSI SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9	5.079.200
889	KEPALA SEKSI PENILAIAN ANGKA KREDIT PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9	5.079.200
890	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
891	DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN II	15	19.280.000
892	KEPALA SUBDIREKTORAT HARMONISASI BIDANG MONETER, JASA KEUANGAN, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN PENANAMAN MODAL	12	9.896.000

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
893	KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG MONETER DAN JASA KEUANGAN	9	5.079.200
894	KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG BADAN USAHA MILIK NEGARA, KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL	9	5.079.200
895	KEPALA SUBDIREKTORAT HARMONISASI BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN FISKAL	12	9.896.000
896	KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, PENGANGGARAN, DAN PERBENDAHARAAN NEGARA	9	5.079.200
897	KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG PENERIMAAN NEGARA, CUKAI, DAN KEPABEANAN	9	5.079.200
898	KEPALA SUBDIREKTORAT HARMONISASI BIDANG SUMBER DAYA ALAM, LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, PRASARANA, AGRARIA, DAN TATA RUANG	12	9.896.000
899	KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG SUMBER DAYA ALAM, LINGKUNGAN HIDUP, DAN KEHUTANAN	9	5.079.200
900	KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG PRASARANA, AGRARIA, DAN TATA RUANG	9	5.079.200
901	KEPALA SUBDIREKTORAT HARMONISASI BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	12	9.896.000
902	KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	9	5.079.200
903	KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG RISET DAN TEKNOLOGI	9	5.079.200
904	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
905	KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER	17	33.240.000

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA		
906	SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	15	19.280.000
907	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN KERJA SAMA	12	9.896.000
908	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN	9	5.079.200
909	KEPALA SUBBAGIAN KELEMBAGAAN DAN KERJA SAMA	9	5.079.200
910	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	9	5.079.200
911	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12	9.896.000
912	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN MUTASI KEPEGAWAIAN	9	5.079.200
913	KEPALA SUBBAGIAN FASILITASI REFORMASI BIROKRASI	9	5.079.200
914	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL DAN PEMBERHENTIAN	9	5.079.200
915	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12	9.896.000
916	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	9	5.079.200
917	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN	9	5.079.200
918	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	9	5.079.200
919	KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM	12	9.896.000
920	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN PERPUSTAKAAN	9	5.079.200
921	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	BARANG MILIK NEGARA DAN UMUM		
922	KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	9	5.079.200
923	KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN KEPEMIMPINAN	15	19.280.000
924	KEPALA BIDANG PROGRAM	12	9.896.000
925	KEPALA SUBBIDANG PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN	9	5.079.200
926	KEPALA SUBBIDANG STANDARDISASI DAN METODA	9	5.079.200
927	KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN	12	9.896.000
928	KEPALA SUBBIDANG PENGAJARAN	9	5.079.200
929	KEPALA SUBBIDANG ADMINISTRASI PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	9	5.079.200
930	KEPALA BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN	12	9.896.000
931	KEPALA SUBBIDANG EVALUASI	9	5.079.200
932	KEPALA SUBBIDANG PELAPORAN	9	5.079.200
933	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
934	KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA	15	19.280.000
935	KEPALA BIDANG PROGRAM	12	9.896.000
936	KEPALA SUBBIDANG PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN	9	5.079.200
937	KEPALA SUBBIDANG STANDARDISASI DAN METODA	9	5.079.200
938	KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN	12	9.896.000
939	KEPALA SUBBIDANG PENGAJARAN	9	5.079.200
940	KEPALA SUBBIDANG ADMINISTRASI PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
941	KEPALA BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN	12	9.896.000
942	KEPALA SUBBIDANG EVALUASI	9	5.079.200
943	KEPALA SUBBIDANG PELAPORAN	9	5.079.200
944	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
945	KEPALA PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI	15	19.280.000
946	KEPALA BIDANG PROGRAM	12	9.896.000
947	KEPALA SUBBIDANG PENYUSUNAN PROGRAM	9	5.079.200
948	KEPALA SUBBIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN	9	5.079.200
949	KEPALA BIDANG PENYELENGARAAN	12	9.896.000
950	KEPALA SUBBIDANG STANDARDISASI KOMPETENSI	9	5.079.200
951	KEPALA SUBBIDANG PENILAIAN KOMPETENSI	9	5.079.200
952	KEPALA BIDANG SISTEM INFORMASI	12	9.896.000
953	KEPALA SUBBIDANG DATA DAN INFORMASI	9	5.079.200
954	KEPALA SUBBIDANG SISTEM DAN JARINGAN	9	5.079.200
955	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
956	DIREKTUR POLTEKIP	15	19.280.000
957	WAKIL DIREKTUR BIDANG AKADEMIK, KETARUNAAN DAN ALUMNI	14	17.064.000
958	WAKIL DIREKTUR BIDANG ADMINISTRASI UMUM	14	17.064.000
959	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KETARUNAAN	12	9.896.000
960	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM	12	9.896.000
961	KEPALA SUBBAGIAN AKADEMIK	9	5.079.200
962	KEPALA SUBBAGIAN KETARUNAAN	9	5.079.200
963	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	KEUANGAN		
964	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA	9	5.079.200
965	DIREKTUR POLTEKIM	15	19.280.000
966	WAKIL DIREKTUR BIDANG ADMNISTRASI AKADEMIK DAN PESERTA DIDIK	14	17.064.000
967	WAKIL DIREKTUR BIDANG ADMNISTRASI UMUM	14	17.064.000
968	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN PESERTA DIDIK	12	9.896.000
969	KEPALA BAGIAN ADMINISTASI UMUM	12	9.896.000
970	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK	9	5.079.200
971	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI PESERTA DIDIK	9	5.079.200
972	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	9	5.079.200
973	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA	9	5.079.200
974	KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	17	33.240.000
975	SEKRETARIS BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	15	19.280.000
976	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12	9.896.000
977	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN	9	5.079.200
978	KEPALA SUBBAGIAN DATA DAN INFORMASI	9	5.079.200
979	KEPALA SUBBAGIAN KELEMBAGAAN, REFORMASI BIROKRASI, EVALUASI DAN PELAPORAN	9	5.079.200
980	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12	9.896.000

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
981	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	9	5.079.200
982	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL	9	5.079.200
983	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI DAN PEMBERHENTIAN	9	5.079.200
984	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12	9.896.000
985	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	9	5.079.200
986	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN	9	5.079.200
987	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	9	5.079.200
988	KEPALA HUBUNGAN MASYARAKAT, KERJASAMA DAN TATA USAHA	12	9.896.000
989	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEARSIPAN	9	5.079.200
990	KEPALA SUBBAGIAN FASILITASI KERJA SAMA	9	5.079.200
991	KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	9	5.079.200
992	KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN UMUM	12	9.896.000
993	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	9	5.079.200
994	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	9	5.079.200
995	KEPALA PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL	15	19.280.000
996	KEPALA BIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN DAN PEMERINTAHAN	12	9.896.000
997	KEPALA SUBBIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN DAN PEMERINTAHAN I	9	5.079.200
998	KEPALA SUBBIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN DAN PEMERINTAHAN II	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
999	KEPALA BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PERDAGANGAN, DAN INFRASTRUKTUR	12	9.896.000
1000	KEPALA SUBBIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PERDAGANGAN, DAN INFRASTRUKTUR I	9	5.079.200
1001	KEPALA SUBBIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PERDAGANGAN, DAN INFRASTRUKTUR II	9	5.079.200
1002	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	12	9.896.000
1003	KEPALA SUBBIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP I	9	5.079.200
1004	KEPALA SUBBIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP II	9	5.079.200
1005	KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA	12	9.896.000
1006	KEPALA SUBBIDANG SOSIAL BUDAYA I	9	5.079.200
1007	KEPALA SUBBIDANG SOSIAL BUDAYA II	9	5.079.200
1008	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
1009	KEPALA PUSAT PERENCANAAN HUKUM NASIONAL	15	19.280.000
1010	KEPALA BIDANG PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK	12	9.896.000
1011	KEPALA SUBBIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN, PEMERINTAHAN DAN SUMBER DAYA ALAM LINGKUNGAN HIDUP	9	5.079.200
1012	KEPALA SUBBIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN SOSIAL BUDAYA	9	5.079.200
1013	KEPALA BIDANG PERENCANAAN LEGISLASI	12	9.896.000
1014	KEPALA SUBBIDANG PENYUSUNAN	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	PROGRAM LEGISLASI NASIONAL		
1015	KEPALA SUBBIDANG PENYUSUNAN PERENCANAAN PERATURAN PEMERINTAH, PERATURAN PRESIDEN DAN FASILITASI PROGRAM LEGISLASI DAERAH	9	5.079.200
1016	KEPALA BIDANG PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK	12	9.896.000
1017	KEPALA SUBBIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN, PEMERINTAHAN DAN SUMBER DAYA ALAM LINGKUNGAN HIDUP	9	5.079.200
1018	KEPALA SUBBIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN SOSIAL BUDAYA	9	5.079.200
1019	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
1020	KEPALA PUSAT DOKUMENTASI DAN JARINGAN INFORMASI HUKUM NASIONAL	15	19.280.000
1021	KEPALA BIDANG OTOMASI DOKUMENTASI HUKUM	12	9.896.000
1022	KEPALA SUBBIDANG PENGOLAHAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM	9	5.079.200
1023	KEPALA SUBBIDANG DIGITALISASI DOKUMEN HUKUM	9	5.079.200
1024	KEPALA BIDANG PELAYANAN INFORMASI HUKUM	12	9.896.000
1025	KEPALA SUBBIDANG PENGUMPULAN DAN PEMELIHARAAN KOLEKSI	9	5.079.200
1026	KEPALA SUBBIDANG SIRKULASI DAN REFERENSI	9	5.079.200
1027	KEPALA BIDANG JARINGAN INFORMASI HUKUM	12	9.896.000
1028	KEPALA SUBBIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGUATAN JARINGAN	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1029	KEPALA SUBBIDANG PENERBITAN DAN PUBLIKASI HUKUM	9	5.079.200
1030	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
1031	KEPALA PUSAT PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM	15	19.280.000
1032	KEPALA BIDANG PENYULUHAN HUKUM	12	9.896.000
1033	KEPALA SUBBIDANG PENGEMBANGAN PENYULUHAN HUKUM	9	5.079.200
1034	KEPALA SUBBIDANG FASILITASI PENYULUH HUKUM	9	5.079.200
1035	KEPALA BIDANG PEMBUDAYAAN HUKUM	12	9.896.000
1036	KEPALA SUBBIDANG PENYULUHAN HUKUM LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG	9	5.079.200
1037	KEPALA SUBBIDANG PEMBINAAN DESA SADAR HUKUM	9	5.079.200
1038	KEPALA BIDANG BANTUAN HUKUM	12	9.896.000
1039	KEPALA SUBBIDANG PROGRAM BANTUAN HUKUM	9	5.079.200
1040	KEPALA SUBBIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI BANTUAN HUKUM	9	5.079.200
1041	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
1042	KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	17	33.240.000
1043	SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA	15	19.280.000
1044	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12	9.896.000
1045	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN	9	5.079.200
1046	KEPALA SUBBAGIAN KELEMBAGAAN, REFORMASI BIROKRASI, EVALUASI DAN	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	PELAPORAN		
1047	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12	9.896.000
1048	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	9	5.079.200
1049	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI DAN PEMBERHENTIAN	9	5.079.200
1050	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL	9	5.079.200
1051	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12	9.896.000
1052	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	9	5.079.200
1053	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN	9	5.079.200
1054	KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN UMUM	12	9.896.000
1055	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	9	5.079.200
1056	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	9	5.079.200
1057	KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TATA USAHA	12	9.896.000
1058	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	9	5.079.200
1059	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN PERSURATAN	9	5.079.200
1060	KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM	15	19.280.000
1061	KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUBTANSI HUKUM	12	9.896.000
1062	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN FORMULASI HUKUM	9	5.079.200
1063	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI HUKUM	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1064	KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN STRUKTUR HUKUM	12	9.896.000
1065	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN HUKUM	9	5.079.200
1066	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENEGAKAN HUKUM	9	5.079.200
1067	KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN BUDAYA HUKUM	12	9.896.000
1068	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT HUKUM	9	5.079.200
1069	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA HUKUM	9	5.079.200
1070	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
1071	KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA	15	19.280.000
1072	KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK SIPIL DAN POLITIK	12	9.896.000
1073	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK SIPIL	9	5.079.200
1074	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK POLITIK	9	5.079.200
1075	KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	12	9.896.000
1076	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK EKONOMI	9	5.079.200
1077	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK SOSIAL DAN BUDAYA	9	5.079.200
1078	KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN RESOLUSI KONFLIK	12	9.896.000
1079	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	PENGEMBANGAN RESOLUSI KONFLIK SIPIL DAN POLITIK		
1080	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN RESOLUSI KONFLIK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	9	5.079.200
1081	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
1082	KEPALA PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN	15	19.280.000
1083	KEPALA BIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	12	9.896.000
1084	KEPALA SUBBIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN	9	5.079.200
1085	KEPALA SUBBIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KETATALAKSANAAN	9	5.079.200
1086	KEPALA BIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA MANUSIA	12	9.896.000
1087	KEPALA SUBBIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	9	5.079.200
1088	KEPALA SUBBIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	9	5.079.200
1089	KEPALA BIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PELAYANAN HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, PEMASYARAKATAN DAN IMIGRASI	12	9.896.000
1090	KEPALA SUBBIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1091	KEPALA SUBBIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PEMASYARAKATAN DAN IMIGRASI	9	5.079.200
1092	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
1093	KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PENELITIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	15	19.280.000
1094	KEPALA BIDANG META ANALISIS DATA PENELITIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	12	9.896.000
1095	KEPALA SUBBIDANG META ANALISIS DATA PENELITIAN HUKUM	9	5.079.200
1096	KEPALA SUBBIDANG META ANALISIS DATA PENELITIAN HAK ASASI MANUSIA	9	5.079.200
1097	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI PENELITIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	12	9.896.000
1098	KEPALA SUBBIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI PENELITIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	9	5.079.200
1099	KEPALA SUBBIDANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENELITIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	9	5.079.200
1100	KEPALA BIDANG FASILITASI PUBLIKASI PENELITIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	12	9.896.000
1101	KEPALA SUBBIDANG PUBLIKASI PENELITIAN HUKUM	9	5.079.200
1102	KEPALA SUBBIDANG PUBLIKASI PENELITIAN HAK ASASI MANUSIA	9	5.079.200
1103	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
1104	KEPALA KANTOR WILAYAH	15	19.280.000

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1105	KEPALA DIVISI ADMINISTRASI	14	17.064.000
1106	KEPALA BAGIAN UMUM	12	9.896.000
1107	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TATA USAHA	9	5.079.200
1108	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	9	5.079.200
1109	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12	9.896.000
1110	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM	9	5.079.200
1111	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PELAPORAN, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI INFORMASI	9	5.079.200
1112	KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN	14	17.064.000
1113	KEPALA BIDANG PEMBINAAN, BIMBINGAN PEMASYARAKATAN, PENGENTASAN ANAK, INFORMASI DAN KOMUNIKASI	12	9.896.000
1114	KEPALA SUBBIDANG PEMBINAAN, BIMBINGAN PEMASYARAKATAN DAN PENGENTASAN ANAK	9	5.079.200
1115	KEPALA SUBBIDANG REGISTRASI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI	9	5.079.200
1116	KEPALA BIDANG KEAMANAN, KESEHATAN, PERAWATAN NARAPIDANA/TAHANAN, DAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA	12	9.896.000
1117	KEPALA SUBBIDANG KEAMANAN	9	5.079.200
1118	KEPALA SUBBIDANG PERAWATAN NARAPIDANA/TAHANAN, PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA	9	5.079.200
1119	KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN	14	17.064.000
1120	KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN IZIN	12	9.896.000

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	TINGGAL KEIMIGRASIAN		
1121	KEPALA SUBBIDANG LALU LINTAS KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
1122	KEPALA SUBBIDANG IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
1123	KEPALA BIDANG INTELIJEN, PENINDAKAN DAN SISTEM INFORMASI DAN SARANA KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	12	9.896.000
1124	KEPALA SUBBIDANG INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
1125	KEPALA SUBBIDANG INFORMASI DAN SARANA KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
1126	KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	14	17.064.000
1127	KEPALA BIDANG PELAYANAN HUKUM	12	9.896.000
1128	KEPALA SUBBIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	9	5.079.200
1129	KEPALA SUBBIDANG PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM	9	5.079.200
1130	KEPALA BIDANG HUKUM	12	9.896.000
1131	KEPALA SUBBIDANG FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH	9	5.079.200
1132	KEPALA SUBBIDANG DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM	9	5.079.200
1133	KEPALA BIDANG HAK ASASI MANUSIA	12	9.896.000
1134	KEPALA SUBBIDANG PEMAJUAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA	9	5.079.200
1135	KEPALA SUB BIDANG PELAYANAN, PENGKAJIAN DAN INFORMASI HAK ASASI MANUSIA	9	5.079.200
1136	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I	14	17.064.000

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1137	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	11	8.757.600
1138	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	11	8.757.600
1139	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN	9	5.079.200
1140	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	9	5.079.200
1141	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	9	5.079.200
1142	KEPALA BIDANG PEMBINAAN NAPI	11	8.757.600
1143	KEPALA SEKSI REGISTRASI	9	5.079.200
1144	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN	9	5.079.200
1145	KEPALA SEKSI PERAWATAN NAPI	9	5.079.200
1146	KEPALA BIDANG KEGIATAN KERJA	11	8.757.600
1147	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KERJA	9	5.079.200
1148	KEPALA SEKSI SARANA KERJA	9	5.079.200
1149	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN HASIL KERJA	9	5.079.200
1150	KEPALA BIDANG ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB	11	8.757.600
1151	KEPALA SEKSI KEAMANAN	9	5.079.200
1152	KEPALA SEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	9	5.079.200
1153	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA	12	9.896.000
1154	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	9	5.079.200
1155	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
1156	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	8	4.595.150
1157	KEPALA URUSAN UMUM	8	4.595.150
1158	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK	9	5.079.200
1159	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8	4.595.150
1160	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN	8	4.595.150

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	KEMASYARAKATAN DAN PERAWATAN		
1161	KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA	9	5.079.200
1162	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KERJA DAN PENGELOLAAN HASIL KERJA	8	4.595.150
1163	KEPALA SUBSEKSI SARANA KERJA	8	4.595.150
1164	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB	9	5.079.200
1165	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	8	4.595.150
1166	KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	8	4.595.150
1167	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA NARKOTIKA	12	9.896.000
1168	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	9	5.079.200
1169	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
1170	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	8	4.595.150
1171	KEPALA URUSAN UMUM	8	4.595.150
1172	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK	9	5.079.200
1173	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8	4.595.150
1174	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN PERAWATAN	8	4.595.150
1175	KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA	9	5.079.200
1176	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KERJA DAN PENGELOLAAN HASIL KERJA	8	4.595.150
1177	KEPALA SUBSEKSI SARANA KERJA	8	4.595.150
1178	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB	9	5.079.200
1179	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	8	4.595.150
1180	KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	8	4.595.150

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1181	KEPALA LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA KELAS I	12	9.896.000
1182	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	9	5.079.200
1183	KEPALA SEKSI REGISTRASI, PERAWATAN DAN PELAYANAN	9	5.079.200
1184	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN	9	5.079.200
1185	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI DAN KLASIFIKASI	8	4.595.150
1186	KEPALA SUBSEKSI PERAWATAN	8	4.595.150
1187	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN	8	4.595.150
1188	KEPALA SUBSEKSI ADMNISTRASI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN	8	4.595.150
1189	KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I	12	9.896.000
1190	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	9	5.079.200
1191	KEPALA SEKSI REGISTRASI DAN KLASIFIKASI	9	5.079.200
1192	KEPALA SEKSI PEMBINAAN	9	5.079.200
1193	KEPALA SEKSI PERAWATAN	9	5.079.200
1194	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN	9	5.079.200
1195	KEPALA URUSAN KEPEGWAIAN DAN TATA USAHA	8	4.595.150
1196	KEPALA URUSAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	8	4.595.150
1197	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8	4.595.150
1198	KEPALA SUBSEKSI PENILAIAN DAN PENGKLASIFIKASIAN	8	4.595.150
1199	KEPALA SUBSEKSI PENDIDIKAN DAN LATIHAN KETERAMPILAN	8	4.595.150
1200	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN	8	4.595.150

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	KEMASYARAKATAN DAN PENGETASAN		
1201	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN MAKANAN, MINUMAN DAN PERLENGKAPAN NARAPIDANA	8	4.595.150
1202	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN KESEHATAN	8	4.595.150
1203	KEPALA SUBSEKSI ADMINISTRASI PENGAWASAN DAN PENEKAKAN DISIPLIN	8	4.595.150
1204	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA	12	9.896.000
1205	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
1206	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NAPI/ANAK DIDIK	9	5.079.200
1207	KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA	9	5.079.200
1208	KEPALA SEKSI ADMNISTRASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN	9	5.079.200
1209	KEPALA KPLP	9	5.079.200
1210	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	8	4.595.150
1211	KEPALA URUSAN UMUM	8	4.595.150
1212	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8	4.595.150
1213	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN PERAWATAN	8	4.595.150
1214	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KERJA DAN PENGELOLAAN HASIL KERJA	8	4.595.150
1215	KEPALA SUBSEKSI SARANA KERJA	8	4.595.150
1216	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	8	4.595.150
1217	KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	8	4.595.150
1218	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II B	12	9.896.000
1219	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	LEMBAGA PEMASYARAKATAN		
1220	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
1221	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	8	4.595.150
1222	KEPALA URUSAN UMUM	8	4.595.150
1223	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NAPI/ANAK DIDIK DAN KEGIATAN KERJA	9	5.079.200
1224	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTI	9	5.079.200
1225	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI DAN BIMBINGAN KEMASYARAKATAN	8	4.595.150
1226	KEPALA SUBSEKSI PERAWATAN NAPI/ANAK DIDIK	8	4.595.150
1227	KEPALA SUBSEKSI KEGIATAN KERJA	8	4.595.150
1228	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	8	4.595.150
1229	KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	8	4.595.150
1230	KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II	12	9.896.000
1231	KEPALA SUB BAGIAN UMUM	9	5.079.200
1232	KEPALA SEKSI REGISTRASI DAN KLASIFIKASI	9	5.079.200
1233	KEPALA SEKSI PEMBINAAN	9	5.079.200
1234	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN	9	5.079.200
1235	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN TATA USAHA	8	4.595.150
1236	KEPALA URUSAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	8	4.595.150
1237	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8	4.595.150
1238	KEPALA SUBSEKSI PENILAIAN DAN PENGKLASIFIKASIAN	8	4.595.150

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1239	KEPALA SUBSEKSI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN KEMASYARAKATAN	8	4.595.150
1240	KEPALA SUBSEKSI PERAWATAN	8	4.595.150
1241	KEPALA SUBSEKSI ADMNISTRASI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN	8	4.595.150
1242	KEPALA LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA KELAS II	10	5.979.200
1243	KEPALA URUSAN UMUM	8	4.595.150
1244	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI DAN KLASIFIKASI	8	4.595.150
1245	KEPALA SUBSEKSI PERAWATAN DAN PELAYANAN	8	4.595.150
1246	KEPALA SUBSEKSI ADMNISTRASI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN	8	4.595.150
1247	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB	12	9.896.000
1248	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	9	5.079.200
1249	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
1250	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	8	4.595.150
1251	KEPALA URUSAN UMUM	8	4.595.150
1252	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK DAN KEGIATAN KERJA	9	5.079.200
1253	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI DAN BIMBINGAN KEMASYARAKATAN	8	4.595.150
1254	KEPALA SUBSEKSI PERAWATAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK	8	4.595.150
1255	KEPALA SUBSEKSI KEGIATAN KERJA	8	4.595.150
1256	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	DAN TATA TERTIB		
1257	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	8	4.595.150
1258	KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	8	4.595.150
1259	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TERBUKA	12	9.896.000
1260	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	9	5.079.200
1261	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
1262	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	8	4.595.150
1263	KEPALA URUSAN UMUM	8	4.595.150
1264	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA /ANAK DIDIK DAN KEGIATAN KERJA	9	5.079.200
1265	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI DAN BIMBINGAN KEMASYARAKATAN	8	4.595.150
1266	KEPALA SUBSEKSI PERAWATAN NARAPIDANA /ANAK DIDIK	8	4.595.150
1267	KEPALA SUBSEKSI KEGIATAN KERJA	8	4.595.150
1268	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB	9	5.079.200
1269	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	8	4.595.150
1270	KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	8	4.595.150
1271	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB	12	9.896.000
1272	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	9	5.079.200
1273	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
1274	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	8	4.595.150

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1275	KEPALA URUSAN UMUM	8	4.595.150
1276	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA /ANAK DIDIK DAN KEGIATAN KERJA	9	5.079.200
1277	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI DAN BIMBINGAN KEMASYARAKATAN	8	4.595.150
1278	KEPALA SUBSEKSI PERAWATAN NARAPIDANA /ANAK DIDIK	8	4.595.150
1279	KEPALA SUBSEKSI KEGIATAN KERJA	8	4.595.150
1280	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB	9	5.079.200
1281	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	8	4.595.150
1282	KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	8	4.595.150
1283	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS III	10	5.979.200
1284	KEPALA URUSAN TATA USAHA	8	4.595.150
1285	KEPALA SUBSEKSI ADMISI DAN ORIENTASI	8	4.595.150
1286	KEPALA SUBSEKSI PEMBINAAN	8	4.595.150
1287	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN	8	4.595.150
1288	KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I	12	9.896.000
1289	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN RUTAN	9	5.079.200
1290	KEPALA URUSAN TATA USAHA	8	4.595.150
1291	KEPALA SEKSI PELAYANAN TAHANAN	9	5.079.200
1292	KEPALA SUBSEKSI ADMINISTRASI DAN PERAWATAN	8	4.595.150
1293	KEPALA SUBSEKSI BANTUAN HUKUM DAN PENYULUHAN	8	4.595.150
1294	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEGIATAN	8	4.595.150
1295	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN RUMAH TAHANAN NEGARA	9	5.079.200
1296	KEPALA SUBSEKSI KEUANGAN DAN	8	4.595.150

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	PERLENGKAPAN		
1297	KEPALA SUBSEKSI UMUM	8	4.595.150
1298	KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA	10	5.979.200
1299	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN RUMAH TAHANAN NEGARA	8	4.595.150
1300	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN TAHANAN	8	4.595.150
1301	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEGIATAN	8	4.595.150
1302	KEPALA SUBSEKSI PENGELOLAAN RUMAH TAHANAN NEGARA	8	4.595.150
1303	KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA PEREMPUAN KELAS IIA	10	5.979.200
1304	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN TAHANAN	8	4.595.150
1305	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEGIATAN	8	4.595.150
1306	KEPALA SUBSEKSI PENGELOLAAN RUMAH TAHANAN NEGARA	8	4.595.150
1307	KEPALA KPR	8	4.595.150
1308	KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB	10	5.979.200
1309	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN RUMAH TAHANAN NEGARA	8	4.595.150
1310	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN TAHANAN	8	4.595.150
1311	KEPALA SUBSEKSI PENGELOLAAN RUMAH TAHANAN NEGARA	8	4.595.150
1312	KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I	12	9.896.000
1313	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
1314	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN	8	4.595.150
1315	KEPALA URUSAN KEUANGAN	8	4.595.150
1316	KEPALA URUSAN UMUM	8	4.595.150
1317	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KLIEN DEWASA	9	5.079.200
1318	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8	4.595.150
1319	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN	8	4.595.150

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	KEMASYARAKATAN		
1320	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KERJA	8	4.595.150
1321	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KLIEN ANAK	9	5.079.200
1322	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8	4.595.150
1323	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN	8	4.595.150
1324	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KERJA	8	4.595.150
1325	KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II	10	5.979.200
1326	KEPALA URUSAN TATA USAHA	8	4.595.150
1327	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KLIEN DEWASA	8	4.595.150
1328	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KLIEN ANAK	8	4.595.150
1329	KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KLAS I	10	5.979.200
1330	KEPALA SUBSEKSI ADMINISTRASI DAN PEMELIHARAAN	8	4.595.150
1331	KEPALA SUBSEKSI PENGAMANAN DAN PENGELOLAAN RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA	8	4.595.150
1332	KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II	10	5.979.200
1333	KEPALA SUBSEKSI ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA	8	4.595.150
1334	KEPALA CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA	10	5.979.200
1335	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN TAHANAN DAN PENGELOLAAN CABANG RUTAN	8	4.595.150
1336	KETUA BALAI HARTA PENINGGALAN	12	9.896.000
1337	SEKRETARIS BALAI HARTA PENINGGALAN	10	5.979.200
1338	KEPALA SEKSI HARTA PENINGGALAN WILAYAH I	9	5.079.200
1339	KEPALA SEKSI HARTA PENINGGALAN	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	WILAYAH II		
1340	KEPALA SEKSI HARTA PENINGGALAN WILAYAH III	9	5.079.200
1341	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
1342	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN	8	4.595.150
1343	KEPALA URUSAN KEUANGAN	8	4.595.150
1344	KEPALA URUSAN UMUM	8	4.595.150
1345	KEPALA URUSAN HARTA PENINGGALAN DAN KEPAILITAN	8	4.595.150
1346	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS	14	17.064.000
1347	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	11	8.757.600
1348	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	9	5.079.200
1349	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	9	5.079.200
1350	KEPALA BIDANG INFORMASI DAN SARANA KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	11	8.757.600
1351	KEPALA SEKSI INFORMASI KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
1352	KEPALA SEKSI SARANA KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
1353	KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN STATUS KEIMIGRASIAN	11	8.757.600
1354	KEPALA SEKSI PERIZINAN KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
1355	KEPALA SEKSI STATUS KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
1356	KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	11	8.757.600
1357	KEPALA SEKSI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
1358	KEPALA SEKSI PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
1359	KEPALA BIDANG PENDARATAN DAN IZIN MASUK	11	8.757.600
1360	KEPALA SEKSI UNIT A	10	5.979.200

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1361	KEPALA SEKSI UNIT B	10	5.979.200
1362	KEPALA SEKSI UNIT C	10	5.979.200
1363	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I	12	9.896.000
1364	KEPALA SEKSI INFORMASI DAN SARANA KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
1365	KEPALA SUBSEKSI INFORMASI	8	4.595.150
1366	KEPALA SUBSEKSI KOMUNIKASI	8	4.595.150
1367	KEPALA SEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
1368	KEPALA SUBSEKSI LINTAS BATAS	8	4.595.150
1369	KEPALA SUBSEKSI PERIZINAN KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
1370	KEPALA SEKSI STATUS KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
1371	KEPALA SUBSEKSI PENENTUAN STATUS KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
1372	KEPALA SUBSEKSI PENELAAHAN STATUS KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
1373	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
1374	KEPALA SUBSEKSI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
1375	KEPALA SUBSEKSI PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
1376	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
1377	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN	8	4.595.150
1378	KEPALA URUSAN KEUANGAN	8	4.595.150
1379	KEPALA URUSAN UMUM	8	4.595.150
1380	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II	11	8.757.600
1381	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
1382	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN	8	4.595.150
1383	KEPALA URUSAN KEUANGAN	8	4.595.150
1384	KEPALA URUSAN UMUM	8	4.595.150
1385	KEPALA SEKSI INFORMASI DAN SARANA	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN		
1386	KEPALA SUBSEKSI INFORMASI	8	4.595.150
1387	KEPALA SUBSEKSI KOMUNIKASI	8	4.595.150
1388	KEPALA SEKSI LALU LINTAS DAN STATUS KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
1389	KEPALA SUBSEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
1390	KEPALA SUBSEKSI STATUS KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
1391	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
1392	KEPALA SUBSEKSI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
1393	KEPALA SUBSEKSI PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
1394	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS III	10	5.979.200
1395	KEPALA URUSAN TATA USAHA	8	4.595.150
1396	KEPALA SUBSEKSI LALU LINTAS DAN STATUS KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
1397	KEPALA SUBSEKSI INFORMASI, SARANA KOMUNIKASI, DAN PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
1398	KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT	14	17.064.000
1399	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	11	8.757.600
1400	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	9	5.079.200
1401	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN	9	5.079.200
1402	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	9	5.079.200
1403	KEPALA BIDANG REGISTRASI DAN PERAWATAN	11	8.757.600
1404	KEPALA SEKSI REGISTRASI, ADMINISTRASI DAN PELAPORAN	9	5.079.200
1405	KEPALA SEKSI PERAWATAN	9	5.079.200
1406	KEPALA SEKSI KESEHATAN	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1407	KEPALA BIDANG PENEMPATAN, KEAMANAN, PEMULANGAN DAN DEPORTASI	11	8.757.600
1408	KEPALA SEKSI KEAMANAN	10	5.979.200
1409	KEPALA SEKSI PENEMPATAN	9	5.079.200
1410	KEPALA SEKSI PEMULANGAN DAN DEPORTASI	9	5.079.200
1411	KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI	12	9.896.000
1412	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
1413	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN	8	4.595.150
1414	KEPALA URUSAN KEUANGAN	8	4.595.150
1415	KEPALA URUSAN UMUM	8	4.595.150
1416	KEPALA SEKSI REGISTRASI, ADMINISTRASI DAN PELAPORAN	9	5.079.200
1417	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8	4.595.150
1418	KEPALA SUBSEKSI ADMINISTRASI DAN PELAPORAN	8	4.595.150
1419	KEPALA SEKSI PERAWATAN DAN KESEHATAN	9	5.079.200
1420	KEPALA SUBSEKSI PERAWATAN	8	4.595.150
1421	KEPALA SUBSEKSI KESEHATAN	8	4.595.150
1422	KEPALA SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN	10	5.979.200
1423	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	9	5.079.200
1424	KEPALA SUBSEKSI KETERTIBAN	9	5.079.200
1425	KEPALA RUMAH SAKIT	12	9.896.000
1426	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	9	5.079.200
1427	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	9	5.079.200

C. DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU, KELAS JABATAN, DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1	PERANCANG PERATURAN PERUU		
	PERANCANG PERATURAN PERUU AHLI PERTAMA	9	5.079.200
	PERANCANG PERATURAN PERUU AHLI MUDA	11	8.757.600
	PERANCANG PERATURAN PERUU AHLI MADYA	13	10.936.000
	PERANCANG PERATURAN PERUU AHLI UTAMA	15	19.280.000
2	PEMERIKSA PATEN AHLI		
	PEMERIKSA PATEN PERTAMA	8	4.595.150
	PEMERIKSA PATEN MUDA	9	5.079.200
	PEMERIKSA PATEN MADYA	11	8.757.600
	PEMERIKSA PATEN UTAMA	13	10.936.000
3	PEMERIKSA MEREK AHLI		
	PEMERIKSA MEREK PERTAMA	8	4.595.150
	PEMERIKSA MEREK MUDA	9	5.079.200
	PEMERIKSA MEREK MADYA	11	8.757.600
	PEMERIKSA MEREK UTAMA	13	10.936.000
4	PEMERIKSA MEREK TERAMPIL		
	PEMERIKSA MEREK PELAKSANA	6	3.510.400
	PEMERIKSA MEREK PELAKSANA LANJUTAN	7	3.915.950
	PEMERIKSA MEREK PENYELIA	8	4.595.150
5	DOKTER/SPELIALIS		

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	DOKTER PERTAMA	8	4.595.150
	DOKTER MUDA	9	5.079.200
	DOKTER MADYA	11	8.757.600
	DOKTER UTAMA	13	10.936.000
6	DOKTER GIGI/SPECIALIS		
	DOKTER GIGI PERTAMA	8	4.595.150
	DOKTER GIGI MUDA	9	5.079.200
	DOKTER GIGI MADYA	11	8.757.600
	DOKTER GIGI UTAMA	13	10.936.000
7	PERAWAT GIGI		
	PERAWAT GIGI PEMULA	5	3.134.250
	PERAWAT GIGI PELAKSANA	6	3.510.400
	PERAWAT GIGI PELAKSANA LANJUTAN	7	3.915.950
	PERAWAT GIGI PENYELIA	8	4.595.150
8	PERAWAT AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	PERAWAT AHLI MUDA	9	5.079.200
	PERAWAT AHLI MADYA	11	8.757.600
	PERAWAT AHLI UTAMA	13	10.936.000
9	PERAWAT TERAMPIL	6	3.510.400
	PERAWAT MAHIR	7	3.915.950
	PERAWAT PENYELIA	8	4.595.150
10	ARSIPARIS AHLI		
	ARSIPARIS PERTAMA	8	4.595.150
	ARSIPARIS MUDA	9	5.079.200
	ARSIPARIS MADYA	11	8.757.600
	ARSIPARIS UTAMA	13	10.936.000
11	ARSIPARIS TERAMPIL		

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	ARSIPARIS PELAKSANA	6	3.510.400
	ARSIPARIS PELAKSANA LANJUTAN	7	3.915.950
	ARSIPARIS PENYELIA	8	4.595.150
12	PUSTAKAWAN AHLI		
	PUSTAKAWAN PERTAMA	8	4.595.150
	PUSTAKAWAN MUDA	9	5.079.200
	PUSTAKAWAN MADYA	11	8.757.600
	PUSTAKAWAN UTAMA	13	10.936.000
13	PUSTAKAWAN TERAMPIL		
	PUSTAKAWAN PELAKSANA	6	3.510.400
	PUSTAKAWAN PELAKSANA LANJUTAN	7	3.915.950
	PUSTAKAWAN PENYELIA	8	4.595.150
14	WIDYAIKWARA AHLI		
	WIDYAIKWARA PERTAMA	8	4.595.150
	WIDYAIKWARA MUDA	9	5.079.200
	WIDYAIKWARA MADYA	11	8.757.600
	WIDYAIKWARA UTAMA	13	10.936.000
15	PENELITI AHLI		
	PENELITI PERTAMA	8	4.595.150
	PENELITI MUDA	9	5.079.200
	PENELITI MADYA	11	8.757.600
	PENELITI UTAMA	13	10.936.000
16	AUDITOR AHLI		
	AUDITOR PERTAMA	8	4.595.150
	AUDITOR MUDA	9	5.079.200
	AUDITOR MADYA	11	8.757.600
	AUDITOR UTAMA	13	10.936.000

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
17	AUDITOR TERAMPIL		
	AUDITOR PELAKSANA	6	3.510.400
	AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN	7	3.915.950
	AUDITOR PENYELIA	8	4.595.150
18	PRANATA KOMPUTER AHLI		
	PRANATA KOMPUTER PERTAMA	8	4.595.150
	PRANATA KOMPUTER MUDA	9	5.079.200
	PRANATA KOMPUTER MADYA	11	8.757.600
	PRANATA KOMPUTER UTAMA	13	10.936.000
19	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL		
	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA	6	3.510.400
	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN	7	3.915.950
	PRANATA KOMPUTER PENYELIA	8	4.595.150
20	ANALIS KEPEGAWAIAN TERAMPIL		
	ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA	6	3.510.400
	ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA LANJUTAN	7	3.915.950
	ANALIS KEPEGAWAIAN PENYELIA	8	4.595.150
21	ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI		
	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA	8	4.595.150
	ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA	9	5.079.200
	ANALIS KEPEGAWAIAN MADYA	11	8.757.600
	ANALIS KEPEGAWAIAN UTAMA	13	10.936.000
22	PSIKOLOG KLINIS AHLI		
	PSIKOLOG KLINIS PERTAMA	8	4.595.150

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	PSIKOLOG KLINIS MUDA	9	5.079.200
	PSIKOLOG KLINIS MADYA	11	8.757.600
	PSIKOLOG KLINIS UTAMA	13	10.936.000
23	PENERJEMAH AHLI		
	PENERJEMAH PERTAMA	8	4.595.150
	PENERJEMAH MUDA	9	5.079.200
	PENERJEMAH MADYA	11	8.757.600
	PENERJEMAH UTAMA	13	10.936.000
24	APOTEKER AHLI		
	APOTEKER PERTAMA	8	4.595.150
	APOTEKER MUDA	9	5.079.200
	APOTEKER MADYA	11	8.757.600
	APOTEKER UTAMA	13	10.936.000
25	ASISTEN APOTEKER		
	ASISTEN APOTEKER PELAKSANA PEMULA	5	3.134.250
	ASISTEN APOTEKER PELAKSANA	6	3.510.400
	ASISTEN APOTEKER PELAKSANA LANJUTAN	7	3.915.950
	ASISTEN APOTEKER PENYELIA	8	4.595.150
26	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI		
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PERTAMA	8	4.595.150
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN MUDA	9	5.079.200
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN MADYA	11	8.757.600
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN UTAMA	13	10.936.000

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
27	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL		
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PELAKSANA PEMULA	5	3.134.250
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PELAKSANA	6	3.510.400
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN LANJUTAN	7	3.915.950
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PENYELIA	8	4.595.150
28	FISIOTERAPIS AHLI		
	FISIOTERAPIS PERTAMA	8	4.595.150
	FISIOTERAPIS MUDA	9	5.079.200
	FISIOTERAPIS MADYA	11	8.757.600
	FISIOTERAPIS UTAMA	13	10.936.000
29	FISIOTERAPIS TERAMPIL		
	FISIOTERAPIS PELAKSANA	6	3.510.400
	FISIOTERAPIS PELAKSANA LANJUTAN	7	3.915.950
	FISIOTERAPIS PENYELIA	8	4.595.150
30	RADIOGRAFER TERAMPIL		
	RADIOGRAFER PELAKSANA	6	3.510.400
	RADIOGRAFER PELAKSANA LANJUTAN	7	3.915.950
	RADIOGRAFER PENYELIA	8	4.595.150
31	PEREKAM MEDIS		
	PEREKAM MEDIS PELAKSANA	6	3.510.400
	PEREKAM MEDIS PELAKSANA LANJUTAN	7	3.915.950
	PEREKAM MEDIS PENYELIA	8	4.595.150

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
32	NUTRISIONIS AHLI		
	NUTRISIONIS PERTAMA	8	4.595.150
	NUTRISIONIS MUDA	9	5.079.200
	NUTRISIONIS MADYA	11	8.757.600
	NUTRISIONIS UTAMA	13	10.936.000
33	NUTRISIONIS TERAMPIL		
	NUTRISIONIS PELAKSANA	6	3.510.400
	NUTRISIONIS PELAKSANA LANJUTAN	7	3.915.950
	NUTRISIONIS PENYELIA	8	4.595.150
34	ADMINISTRATOR KESEHATAN		
	ADMINISTRATOR PERTAMA	8	4.595.150
	ADMINISTRATOR MUDA	9	5.079.200
	ADMINISTRATOR MADYA	11	8.757.600
	ADMINISTRATOR UTAMA	13	10.936.000
35	PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI		
	PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI PERTAMA	8	4.595.150
	PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI MUDA	9	5.079.200
	PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI MADYA	11	8.757.600
	PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI UTAMA	13	10.936.000
36	BIDAN AHLI		
	BIDAN PERTAMA	8	4.595.150
	BIDAN MUDA	9	5.079.200
	BIDAN MADYA	11	8.757.600
	BIDAN UTAMA	13	10.936.000
37	BIDAN TERAMPIL		
	BIDAN PELAKSANA PEMULA	5	3.134.250
	BIDAN PELAKSANA	6	3.510.400
	BIDAN PELAKSANA LANJUTAN	7	3.915.950

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	BIDAN PENYELIA	8	4.595.150
38	PENYULUH HUKUM AHLI		
	PENYULUH HUKUM PERTAMA	8	4.595.150
	PENYULUH HUKUM MUDA	9	5.079.200
	PENYULUH HUKUM MADYA	11	8.757.600
	PENYULUH HUKUM UTAMA	13	10.936.000
39	ANALIS KEIMIGRASIAN AHLI		
	ANALIS KEIMIGRASIAN PERTAMA	8	4.595.150
	ANALIS KEIMIGRASIAN MUDA	9	5.079.200
	ANALIS KEIMIGRASIAN MADYA	11	8.757.600
	ANALIS KEIMIGRASIAN UTAMA	13	10.936.000
40	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN TERAMPIL		
	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN PEMULA	5	3.134.250
	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN PELAKSANA	6	3.510.400
	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	7	3.915.950
	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN PENYELIA	8	4.595.150
41	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN		
	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PERTAMA/AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MUDA/AHLI MUDA	9	5.079.200
	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MADYA/AHLI MADYA	11	8.757.600
	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN UTAMA/AHLI UTAMA	13	10.936.000
42	ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN		

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PELAKSANA/TERAMPIL	6	3.510.400
	ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	7	3.915.950
	ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PENYELIA	8	4.595.150
43	DOSEN		
	ASISTEN AHLI	9	5.079.200
	LEKTOR	11	8.757.600
	LEKTOR KEPALA	13	10.936.000
	PROFESOR	15	19.280.000
44	PERENCANA TINGKAT AHLI		
	PERENCANA PERTAMA	8	4.595.150
	PERENCANA MUDA	9	5.079.200
45	ANALIS KEBIJAKAN TINGKAT AHLI		
	ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA	8	4.595.150
	ANALIS KEBIJAKAN MUDA	9	5.079.200
46	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA TINGKAT AHLI		
	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PERTAMA	8	4.595.150
	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MUDA	9	5.079.200
47	AUDITOR KEPEGAWAIAN AHLI		
	AUDITOR KEPEGAWAIAN PERTAMA	8	4.595.150
	AUDITOR KEPEGAWAIAN MUDA	9	5.079.200
48	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA		
	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PERTAMA	8	4.595.150
	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MUDA	9	5.079.200

D. DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM DAN JABATAN LAINNYA,
KELAS JABATAN, DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
STAF AHLI DAN STAF KHUSUS MENTERI			
1	STAF AHLI BIDANG HUKUM LINGKUNGAN DAN PERTANAHAN	16	27.577.500
2	STAF AHLI BIDANG PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA	16	27.577.500
3	STAF AHLI BIDANG PENGEMBANGAN BUDAYA HUKUM	16	27.577.500
4	STAF AHLI BIDANG PEREKONOMIAN DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI	16	27.577.500
5	STAF AHLI BIDANG POLITIK SOSIAL DAN KEAMANAN	16	27.577.500
6	STAF KHUSUS MENTERI	16	27.577.500
ANGGOTA TEKNIS BHP			
	ANGGOTA TEKNIS HUKUM	10	5.979.200
FUNGSIONAL UMUM			
1	BENDAHARA PENGELUARAN PUSAT	8	4.595.150
2	BENDAHARA PENERIMAAN PUSAT	8	4.595.150
3	ANALIS EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7	3.915.950
4	ANALIS JABATAN	7	3.915.950
5	ANALIS KEBUTUHAN DAN MANFAAT PELATIHAN	7	3.915.950
6	ANALIS KELEMBAGAAN	7	3.915.950
7	ANALIS KONSEPSI, PRAKARSA DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7	3.915.950
8	ANALIS PENDAPAT HUKUM DAN ADVOKASI	7	3.915.950

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
9	ANALIS PENGADUAN MASYARAKAT	7	3.915.950
10	ANALIS PENGEMBANGAN HUKUM	7	3.915.950
11	ANALIS PENGEMBANGAN PEGAWAI	7	3.915.950
12	ANALIS PENYELESAIAN PEWARGANEGARAAN	7	3.915.950
13	ANALIS PERATURAN DAERAH	7	3.915.950
14	ANALIS PERENCANAAN, PENGGUNAAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA	7	3.915.950
15	ANALIS PERJANJIAN KERJA SAMA	7	3.915.950
16	ANALIS PERMASALAHAN HAM	7	3.915.950
17	ANALIS PERMASALAHAN HUKUM	7	3.915.950
18	ANALIS PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI	7	3.915.950
19	ANALIS PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	7	3.915.950
20	ANALIS PERMOHONAN PENDAPAT HUKUM	7	3.915.950
21	ANALIS PERTIMBANGAN BANTUAN HUKUM	7	3.915.950
22	ANALIS PERTIMBANGAN EKSTRADISI	7	3.915.950
23	ANALIS PERTIMBANGAN HUKUM	7	3.915.950
24	ANALIS PROGRAM BIMBINGAN	7	3.915.950
25	ANALIS RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7	3.915.950
26	ANALIS SIDIK JARI	7	3.915.950
27	ANALIS SISTEM APLIKASI DAN JARINGAN KOMPUTER	7	3.915.950
28	ANALIS SISTEM PROSEDUR DAN METODE KERJA	7	3.915.950
29	ANALIS STANDARDISASI SARANA KERJA	7	3.915.950
30	BENDAHARA PENERIMAAN SATKER	7	3.915.950
31	BENDAHARA PENGELUARAN SATKER	7	3.915.950
32	NAHKODA	7	3.915.950
33	PENELAAH DOKUMEN FISIK PERSEROAN	7	3.915.950
34	PENELAAH KEIMIGRASIAN	7	3.915.950

35	PENELAAH RANCANGAN PERJANJIAN EKSTRADISI	7	3.915.950
36	PENELAAH STATUS WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN	7	3.915.950
37	PENERJEMAH BAHAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7	3.915.950
38	PENGEVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN	7	3.915.950
39	PENYULUH HAM	7	3.915.950
40	PENYUSUN ABSTRAKSI HUKUM	7	3.915.950
41	PENYUSUN INFORMASI HUKUM	7	3.915.950
42	PENYUSUN KONSEP KETERANGAN PEMERINTAH	7	3.915.950
43	PENYUSUN LAPORAN DAN HASIL EVALUASI	7	3.915.950
44	PENYUSUN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN	7	3.915.950
45	PENYUSUN LAPORAN PENGAWASAN	7	3.915.950
46	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	7	3.915.950
47	PENYUSUN MATERI BIMBINGAN DAN KONSULTASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH	7	3.915.950
48	PENYUSUN MATERI PENGHARMONISASIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7	3.915.950
49	PENYUSUN MATERI KEBIJAKAN	7	3.915.950
50	PENYUSUN NASKAH AKADEMIK	7	3.915.950
51	PENYUSUN PROGRAM	7	3.915.950
52	PENYUSUN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN	7	3.915.950
53	PENYUSUN TINDAK LANJUT DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN	7	3.915.950
54	PENYUSUN BAHAN KERJA SAMA	7	3.915.950
55	DOKUMENTALIS HUKUM	6	3.510.400
56	KOMANDAN JAGA PEMASYARAKATAN/KEIMIGRASIAN	6	3.510.400
57	PENGELOLA ARSIP KEPEGAWAIAN	6	3.510.400
58	PENGELOLA BANTUAN HUKUM	6	3.510.400

59	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	3.510.400
60	PENGELOLA BASAN/BARAN	6	3.510.400
61	PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	6	3.510.400
62	PENGELOLA DATA KEIMIGRASIAN	6	3.510.400
63	PENGELOLA DATA PENGHARMONISASIAN	6	3.510.400
64	PENGELOLA HASIL KERJA	6	3.510.400
65	PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI	6	3.510.400
66	PENGELOLA KEUANGAN	6	3.510.400
67	PENGELOLA PEMBIMBINGAN KEMANDIRIAN	6	3.510.400
68	PENGELOLA PEMBINAAN INTELEKTUAL	6	3.510.400
69	PENGELOLA PEMBINAAN KEMANDIRIAN	6	3.510.400
70	PENGELOLA PEMBINAAN KEPRIBADIAN	6	3.510.400
71	PENGELOLA PEMBINAAN ROHANI	6	3.510.400
72	PENGELOLA PENERBITAN JURNAL LEGISLASI INDONESIA	6	3.510.400
73	REGISTRATOR PEMASYARAKATAN	6	3.510.400
74	PENGELOLA RUMAH DETENSI	6	3.510.400
75	PENGELOLA SARANA KERJA	6	3.510.400
76	PENGELOLA SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN	6	3.510.400
77	PENGELOLA PENSIUN/PEMBERHENTIAN PNS	6	3.510.400
78	PENGELOLA WEBSITE	6	3.510.400
79	PENGEVALUASI KEGIATAN PROGRAM	6	3.510.400
80	PENGOLAH APLIKASI SISTEM INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6	3.510.400
81	PENGOLAH BAHAN DISTRIBUSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6	3.510.400
82	PENGOLAH BAHAN EVALUASI DAN DOKUMENTASI EKSTRADISI	6	3.510.400
83	PENGOLAH BAHAN EVALUASI DAN PELAPORAN	6	3.510.400
84	PENGOLAH BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI	6	3.510.400

85	PENGOLAH BAHAN PENGKAJIAN DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6	3.510.400
86	PENGOLAH BAHAN PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN	6	3.510.400
87	PENGOLAH DAN PENYUSUN BAHAN BIMBINGAN TEKNIS HAM	6	3.510.400
88	PENGOLAH DAN PENYUSUN DATA FASILITATOR BIMBINGAN TEKNIS HAM	6	3.510.400
89	PENGOLAH DAN PENYUSUN DATA PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT	6	3.510.400
90	PENGOLAH DATA ADMINISTRASI KOMISI BANDING	6	3.510.400
91	PENGOLAH DATA ANGGARAN	6	3.510.400
92	PENGOLAH DATA APLIKASI DAN DATABASE	6	3.510.400
93	PENGOLAH DATA DAKTILOSKOPI	6	3.510.400
94	PENGOLAH DATA DAN BAHAN PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	6	3.510.400
95	PENGOLAH DATA DAN DOKUMENTASI HUKUM INTERNASIONAL UMUM	6	3.510.400
96	PENGOLAH DATA DISEMINASI HAM	6	3.510.400
97	PENGOLAH DATA EVALUASI DAN INFORMASI	6	3.510.400
98	PENGOLAH DAN PENYUSUN EVALUASI DAN PENGEMBANGAN BIMBINGAN TEKNIS	6	3.510.400
99	PENGOLAH DATA HARTA PENINGGALAN	6	3.510.400
100	PENGOLAH DATA HASIL LAPORAN VERIFIKASI	6	3.510.400
101	PENGOLAH DATA HASIL PENELITIAN	6	3.510.400
102	PENGOLAH DATA HASIL PERTIMBANGAN DAN PENILAIAN PERLENGKAPAN	6	3.510.400
103	PENGOLAH DATA INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG	6	3.510.400

104	PENGOLAH DATA INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI HAK CIPTA DAN DESAIN	6	3.510.400
105	PENGOLAH DATA KEGIATAN ANTARBADAN INTERNASIONAL	6	3.510.400
106	PENGOLAH DATA KEGIATAN RENCANA, PROGRAM DAN ANGGARAN	6	3.510.400
107	PENGOLAH DATA KELEMBAGAAN	6	3.510.400
108	PENGOLAH DATA KERJASAMA	6	3.510.400
109	PENGOLAH DATA KESEHATAN	6	3.510.400
110	PENGOLAH DATA KLASIFIKASI DESAIN INDUSTRI	6	3.510.400
111	PENGOLAH DATA KLASIFIKASI KELAS BARANG	6	3.510.400
112	PENGOLAH DATA KOMPILASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MASALAH DAN KASUS	6	3.510.400
113	PENGOLAH DATA KOVENAN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	6	3.510.400
114	PENGOLAH DATA KOVENAN HAK SIPIL DAN POLITIK	6	3.510.400
115	PENGOLAH DATA LAPORAN	6	3.510.400
116	PENGOLAH DATA LAPORAN ANALISA KEBUTUHAN DAN PEMBAKUAN PERLENGKAPAN	6	3.510.400
117	PENGOLAH DATA LAPORAN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	6	3.510.400
118	PENGOLAH DATA LAPORAN HAK KELOMPOK RENTAN	6	3.510.400
119	PENGOLAH DATA LAPORAN HAK SIPIL DAN POLITIK	6	3.510.400
120	PENGOLAH DATA LAPORAN HAM YANG BERAT	6	3.510.400
121	PENGOLAH DATA LAPORAN HASIL PENYALURAN PERLENGKAPAN	6	3.510.400
122	PENGOLAH DATA LAPORAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN	6	3.510.400

123	PENGOLAH DATA LAPORAN MATERI INFORMASI	6	3.510.400
124	PENGOLAH DATA LAPORAN METODOLOGI DISEMINASI HAM	6	3.510.400
125	PENGOLAH DATA LAPORAN PENILAIAN PERBENDAHARAAN	6	3.510.400
126	PENGOLAH DATA LAPORAN PRODUKSI DAN INFORMASI	6	3.510.400
127	PENGOLAH DATA LAPORAN SISTEM APLIKASI DAN DATABASE	6	3.510.400
128	PENGOLAH DATA PENGEMBANGAN JARINGAN BIMBINGAN TEKNIS HAM	6	3.510.400
129	PENGOLAH DATA PERENCANAAN DAN PROGRAM	6	3.510.400
130	PENGOLAH DATA WASIAT	6	3.510.400
131	PENGOLAH SAI	6	3.510.400
132	PENYUSUN BAHAN KOORDINASI DAN MONITORING PERSIDANGAN	6	3.510.400
133	PENYUSUN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA	6	3.510.400
134	ROHANIAWAN AGAMA/PEMBIMBING AGAMA	6	3.510.400
135	SEKRETARIS PIMPINAN	6	3.510.400
136	TEKNISI JARINGAN	6	3.510.400
137	VERIFIKATOR	6	3.510.400
138	OPERATOR KOMPUTER	5	3.134.250
139	PEMBUAT DAFTAR GAJI	5	3.134.250
140	PEMELIHARA KANTOR	5	3.134.250
141	PEMERIKSA PELANGGARAN TATA TERTIB	5	3.134.250
142	PEMROSES BERKAS PERMOHONAN HARTA PENINGGALAN	5	3.134.250
143	PEMROSES DATA PENYIDIKAN DAN LITIGASI	5	3.134.250
144	PEMROSES IZIN ADVOKAT ASING	5	3.134.250
145	PEMROSES JAMINAN SOSIAL	5	3.134.250

146	PEMROSES LAYANAN HUKUM UMUM	5	3.134.250
147	PEMROSES LEGALISASI	5	3.134.250
148	PEMROSES MUTASI KEPEGAWAIAN	5	3.134.250
149	PEMROSES PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	5	3.134.250
150	PEMROSES STATUS KEWARGANEGARAAN RI	5	3.134.250
151	PEMROSES PENETAPAN PENGHAPUSAN PERLENGKAPAN	5	3.134.250
152	PEMROSES PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI	5	3.134.250
153	PEMROSES PENGEMBANGAN METODE PENYULUHAN HUKUM	5	3.134.250
154	PEMROSES PENYELESAIAN SENGKETA, LITIGASI DAN PENYIDIKAN	5	3.134.250
155	PEMROSES URUSAN ADMINISTRASI KOMISI BANDING	5	3.134.250
156	PEMROSES PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN	5	3.134.250
157	PENATAUSAHAAN	5	3.134.250
158	PENGADMINISTRASI BARANG DAN ATK	5	3.134.250
159	PENGADMINISTRASI BARANG MILIK NEGARA	5	3.134.250
160	PENGADMINISTRASI DATA PERMOHONAN PENDAPAT HUKUM	5	3.134.250
161	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	3.134.250
162	PENGADMINISTRASI JAMINAN FIDUSIA	5	3.134.250
163	PENGADMINISTRASI KEBUTUHAN DAN PEMBAKUAN PERLENGKAPAN	5	3.134.250
164	PENGADMINISTRASI LAYANAN KUNJUNGAN	5	3.134.250
165	PENGADMINISTRASI MANAJEMEN OUTSOURCING TEKNOLOGI INFORMASI	5	3.134.250
166	PENGADMINISTRASI PERJALANAN DINAS	5	3.134.250
167	PENGADMINISTRASI PERLENGKAPAN KEAMANAN	5	3.134.250
168	PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN	5	3.134.250

169	PENGADMINISTRASI UMUM	5	3.134.250
170	PENGADMINISTRASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5	3.134.250
171	PENGAMBIL SIDIK JARI	5	3.134.250
172	PENGAWAL TAHANAN/NARAPIDANA	5	3.134.250
173	PENGELOLA ADMINISTRASI DIKLAT	5	3.134.250
174	PENGELOLA DAN PENGOLAH MAKANAN	5	3.134.250
175	PENGELOLA HASIL BELAJAR/EVALUASI PESERTA DIKLAT/PELATIHAN	5	3.134.250
176	PENGELOLA HUKUMAN DISIPLIN	5	3.134.250
177	PENGELOLA KENDARAAN DINAS	5	3.134.250
178	PENGELOLA TATA NASKAH	5	3.134.250
179	PENGHIMPUN BERITA	5	3.134.250
180	PENGHUBUNG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	3.134.250
181	PENGHUBUNG ANTARLEMBAGA	5	3.134.250
182	PENGOLAH ADMINISTRASI PIMPINAN	5	3.134.250
183	PENGOLAH ARSIP DAN DOKUMENTASI	5	3.134.250
184	PENGOLAH ARSIP TERAAN	5	3.134.250
185	PENGOLAH DATA GAJI PEGAWAI	5	3.134.250
186	PENGOLAH DATA INVENTARIS	5	3.134.250
187	PENGOLAH DATA KEGIATAN PENGAMANAN	5	3.134.250
188	PENGOLAH DATA KENDARAAN OPERASIONAL	5	3.134.250
189	PENGOLAH DATA LAPORAN PEMBUKUAN	5	3.134.250
190	PENGOLAH DATA LAPORAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN	5	3.134.250
191	PENGOLAH DATA LAPORAN PENGIRIMAN DAN PENGANGKUTAN PERLENGKAPAN	5	3.134.250
192	PENGOLAH DATA SIDIK JARI	5	3.134.250
193	PENJAGA PINTU UTAMA PEMASYARAKATAN	5	3.134.250
194	PENYIAP BAHAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5	3.134.250
195	PENYIAP BAHAN BIMBINGAN DAN KONSULTASI PERANCANG PERATURAN DAERAH	5	3.134.250

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
196	PENYIAP BAHAN DISTRIBUSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5	3.134.250
197	PENYIAP BAHAN HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5	3.134.250
198	PENYIAP BAHAN HUKUM TIDAK TERTULIS	5	3.134.250
199	PENYIAP BAHAN LAPORAN DAN EVALUASI	5	3.134.250
200	PENYIAP BAHAN LAPORAN HASIL PERTEMUAN ILMIAH	5	3.134.250
201	PENYIAP BAHAN LEGALISASI	5	3.134.250
202	PENYIAP BAHAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI	5	3.134.250
203	PENYIAP BAHAN PEMBELAJARAN	5	3.134.250
204	PENYIAP BAHAN PENELITIAN HUKUM	5	3.134.250
205	PENYIAP BAHAN PENETAPAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL	5	3.134.250
206	PENYIAP BAHAN PENGEMBANGAN JARINGAN INFORMASI HUKUM	5	3.134.250
207	PENYIAP BAHAN PENGEMBANGAN METODE PENYULUHAN HUKUM	5	3.134.250
208	PENYIAP BAHAN PENGEMBANGAN OTOMASI	5	3.134.250
209	PENYIAP BAHAN PENGKAJIAN HUKUM	5	3.134.250
210	PENYIAP BAHAN PENYELENGGARA DIKLAT/PELATIHAN/PENYULUHAN	5	3.134.250
211	PENYIAP BAHAN PUBLIKASI	5	3.134.250
212	PENYIAP BAHAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5	3.134.250
213	PENYIAP DATA DAN BAHAN PENGHARMONISASIAN	5	3.134.250
214	PENYIAP DATA DAN PROGRAM LEGISLASI	5	3.134.250
215	PENYIAP DATA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN	5	3.134.250

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
216	PENYIAP DOKUMENTASI NASKAH PENGUNDANGAN PERATURAN	5	3.134.250
217	PENYIAP BAHAN KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM	5	3.134.250
218	PENYUSUN ARSIP DAN DOKUMENTASI	5	3.134.250
219	PETUGAS DOKUMENTASI (FOTOGRAFER)	5	3.134.250
220	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	5	3.134.250
221	PETUGAS PENGAMANAN DETENI	5	3.134.250
222	PETUGAS PROTOKOL	5	3.134.250
223	POLISI KHUSUS KEIMIGRASIAN/PEMASYARAKATAN	5	3.134.250
224	SATUAN PENGAMAN TAHANAN/NARAPIDANA	5	3.134.250
225	TEKNISI	5	3.134.250
226	PENGELOLA KELENGKAPAN DAN PERAWATAN NARAPIDANA/TAHANAN	4	2.985.000
227	OPERATOR MESIN	4	2.985.000
228	OPERATOR TELEPON	4	2.985.000
229	PRAMU ACARA	4	2.985.000
230	TARUNA AKADEMI	4	2.985.000
231	PENGEMUDI	3	2.898.000
232	AGENDARIS	3	2.898.000
233	PETUGAS PENGGANDAAN	3	2.898.000
234	CARAKA	3	2.898.000

D. PERMOHONAN IZIN

KOP SURAT

PERMOHONAN IZIN

(Tidak Masuk/Terlambat Masuk Kerja/Pulang Sebelum Waktunya/Tidak Berada di Tempat Tugas/Tidak Melakukan Rekam Kehadiran)

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa pada hari..... tanggal saya tidak masuk kerja/terlambat masuk kerja/pulang sebelum waktunya/tidak berada di tempat tugas/tidak melakukan rekam kehadiran*) karena

....., 20....

Persetujuan atasan langsung,
.....,

.....

.....

*) coret yang tidak perlu.

E. SURAT KETERANGAN

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

pada hari..... tanggal tidak masuk kerja/terlambat masuk kerja/pulang sebelum waktunya/tidak berada di tempat tugas/tidak melakukan rekam kehadiran*) karena ada keperluan penting dan mendesak yaitu

....., 20....

Atasan Langsung,

.....

NIP.

*) coret yang tidak perlu.

F. LAPORAN RINCIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

KOP SURAT

LAPORAN RINCIAN PEMBAYARAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

1. DATA PEGAWAI

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Gol. :
- d. Jabatan :

2. CAPAIAN NILAI SKP

- a. Nomordantanggal SKP :
- b. Periode : Januari – Juli/ Juli – Desember (coret salah satu)
- c. Nilai SKP :

3. KETAATAN TERHADAP PENENTUAN KEHADIRAN

No	Uraian	Potongan per kejadian	Jumlah Kehadiran	Jumlah Potongan (Rp.)
a	Pegawai tidak masuk kerja/kuliah/belajar dengan alasan yang sah.%		
b	Pegawai terlambat masuk kerja/kuliah/belajar atau pulang sebelum waktunya, atau meninggalkan pekerjaan dan atau kantor pada jam kerja dengan alasan yang sah.%		
c	Pegawai tidak masuk kerja/kuliah/belajar tanpa alasan yang sah%		
d	Pegawai terlambat masuk kerja/%		

	kuliah/belajar atau pulang sebelum waktunya, atau meninggalkan pekerjaan, dan/atau kantor pada jam kerja tanpa alasan.			
	JUMLAH			

4. PEMBAYARAN SEHUBUNGAN DENGAN CUTI

No	Uraian Cuti	Pembayaran Tunjangan Kinerja
1	(Uraikan cuti yang dilaksanakan)	(dibayarkan sejumlah ...% selama Bulan) sejumlah Rp..... setiap bulannya.

5. PEMBAYARAN SEHUBUNGAN DENGAN CUTI

6.1.	Jumlah bruto	:	Rp.
6.2.	Penyesuaian atas capaian nilai SKP	:	Rp.
6.3.	Penyesuaian atas ketaatan terhadap ketentuan kehadiran	:	Rp.
6.4.	Penyesuaian atas pelaksanaan cuti	:	Rp.
	Jumlah Netto		Rp.

Tanggal : 20...

PEJABAT YANG BERWENANG,

NIP.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY